



**BUPATI PANGANDARAN
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PANGANDARAN
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANGANDARAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka penataan dan penyelenggaraan kearsipan, untuk mendukung pengelolaan arsip dinamis yang efektif dan efisien, perlu disusun klasifikasi arsip Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4) Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan dan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan, Klasifikasi Arsip ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Klasifikasi Arsip di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pangandaran;
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;
 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan;
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat;

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dua kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Tata Kearsipan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1979 tentang Tata Kearsipan Departemen Dalam Negeri;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2012 tentang Pedoman Tata Kearsipan di Daerah;
14. Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pangandaran Nomor 3 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Pangandaran;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANGANDARAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pangandaran;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;
3. Bupati adalah Bupati Pangandaran;
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pangandaran;
5. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
6. Klasifikasi adalah penggolongan naskah dinas berdasarkan masalah yang dimuat di dalamnya dan merupakan pedoman untuk pengaturan, penataan, dan penemuan kembali arsip;

7. Klasifikasi masalah adalah penggolongan arsip yang didasarkan atas isi masalah yang terdapat di dalam arsip;
8. Kode Klasifikasi arsip adalah merupakan bagian dari klasifikasi arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya;
9. Kode Komponen adalah tanda pengenal komponen unit pengolah yang mengolah atau menangani naskah dinas dan ditulis dengan huruf ditempatkan dibelakang nomor urut;
10. Kode Pembantu adalah kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri yang merupakan bentuk penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya dan ditulis ditambahkan di belakang kode yang memerlukan perincian lebih lanjut;
11. Nomor Urut adalah nomor urut naskah dinas yang dimulai dengan angka 01 dan seterusnya sebagai sarana inventarisasi jumlah naskah dinas, meliputi permulaan tahun dan nomor urut dimulai kembali dengan angka 01;
12. Arsip Statuter adalah arsip-arsip peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Menteri, dan Peraturan Gubernur;
13. Indeks adalah ciri atau tanda dari naskah dinas berupa kata rangkap yang akan dijadikan petunjuk dan tanda pengenal untuk memudahkan penemuan kembali arsip;
14. Indeksi Kaitan adalah indek yang terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam Pola Klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya;
15. Kartu Tunjuk Silang adalah formulir yang dipergunakan untuk memberi petunjuk tentang adanya lebih dari satu masalah pada satu naskah dinas dan sebagai sarana petunjuk tentang adanya hubungan dengan file yang lainnya.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten adalah sebagai pedoman arsip yang menjadi tanda pengenal urusan dalam bentuk angka yang berfungsi sebagai penuntun terhadap letak berkas di tempat penyimpanannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Klasifikasi Arsip Pemerintah Daerah Kabupaten, meliputi:

- a. 000 Umum;
- b. 100 Pemerintahan;
- c. 200 Politik;
- d. 300 Keamanan/Ketertiban;

- e. 400 Kesejahteraan Rakyat;
- f. 500 Perekonomian;
- g. 600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan;
- h. 700 Pengawasan;
- i. 800 Kepegawaian; dan
- j. 900 Keuangan.

BAB IV KLASIFIKASI ARSIP

Pasal 4

- (1) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum pada Lampiran, dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Klasifikasi Arsip sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perincian kesatu, perincian kedua, dan perincian ketiga.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pangandaran.

Ditetapkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 14

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PANGANDARAN

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL :

INDEKS KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN PANGANDARAN

A. BENTUK DAN SUSUNAN POLA KLASIFIKASI

1. Klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi, juga berlaku bagi Instansi Pemerintah Pusat yang ada di Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta instansi lainnya yang berada di Daerah Provinsi.

Klasifikasi tersebut disusun berdasarkan masalah yang mencerminkan fungsi dan kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pembinaan masyarakat, diberi kode dengan angka Arab, diperinci secara DESIMAL dengan mempergunakan TIGA ANGKA DASAR, dilengkapi dengan kode pembantu dan singkatan nama komponen.

2. Klasifikasi Arsip disusun secara berjenjang dengan menggunakan prinsip perkembangan dari umum kepada khusus. Dalam hubungan masalah didahului oleh perincian dasar, masing-masing perincian pertama, perincian kedua dan perincian ketiga sebagai pola dasar yang berfungsi sebagai jembatan penolong dalam menemukan kode masalah yang tercantum dalam pola.
3. Angka 100 sampai dengan 600 merupakan kode tugas-tugas substantif, sedangkan angka 700, 800 dan 900 merupakan kode tugas-tugas fasilitatif. Kode 000 menampung masalah-masalah fasilitatif di luar pengawasan, kepegawaian, dan keuangan. Disamping itu juga ditampung masalah-masalah yang berkaitan dengan kerumah tanggaan, seperti protokol urusan dalam dan masalah yang tidak dapat dimasukkan dalam kelompok lainnya, seperti perjalanan dinas, peralatan, lambang Negara atau Daerah, tanda-tanda kehormatan dan sebagainya.
4. Dengan demikian maka sepuluh pokok masalah tersebut telah menampung seluruh kegiatan pelaksanaan tugas Pemerintah Daerah Provinsi termasuk instansi-instansi dalam lingkungannya.

Sepuluh pokok masalah yang dimaksudkan adalah sebagai berikut:

000	Umum
100	Pemerintahan
200	Politik
300	Keamanan dan Ketertiban
400	Kesejahteraan
500	Perekonomian
600	Pekerjaan Umum dan Ketenagaan
700	Pengawasan
800	Kepegawaian
900	Keuangan

5. Kode pembantu merupakan penyajian dari masalah tertentu yang merupakan aspek yang selalu timbul berkaitan dengan masalah lainnya, ditambahkan dibelakang tiap kode yang memerlukan perincian lebih lanjut, untuk dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Kode pembantu dimaksud tersebut adalah:

01	Perencanaan
02	Penelitian

- 03 Pendidikan
- 04 Laporan
- 05 Panitia
- 06 Seminar, Lokakarya, Workshop
- 07 Statistik
- 08 Peraturan perundang-undangan
- 09

6. Untuk mengetahui komponen yang menangani masalah, diperlukan kode dan singkatan nama komponen untuk Pemerintah Daerah Kabupaten, diatur sebagai berikut:
 - a. Sekretariat Daerah
 - b. Sekretariat DPRD
 - c. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga
 2. Dinas Kesehatan
 3. Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 4. Dinas Pariwisata, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi dan UMKM
 5. Dinas Pekerjaan Umum, Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
 6. Dinas Kelautan, Pertanian dan Kehutanan
 7. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
 - d. Lembaga Teknis Daerah, terdiri dari :
 1. Inspektorat
 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 3. Badan Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Kependudukan, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa
 4. Badan Pengendalian Lingkungan Hidup
 5. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
 - e. Kecamatan
 - f. Satuan Polisi Pamong Praja
 - g. Lembaga Lain :
 1. Badan Pelayanan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal
 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah

B. CARA PENGGUNAAN

1. Untuk memahami pola klasifikasi terlebih dahulu harus memahami perincian pertama, kedua dan ketiga. Selanjutnya perlu memahami hubungan antar masalah dan anak masalahnya pada pola dengan memperhatikan efek dengan prinsip berjenjang. Tiap kode, kecuali kode masalah yang pokok pada perincian pertama merupakan bagian dan sub ordinat dari kode atasannya. Untuk mendapatkan gambaran yang benar masalah 147,231 harus diketahui bahwa masalah ini merupakan bagian dari 147,23 dan 147.23 merupakan bagian dari 147, 147 bagian dari 140 dan 140 bagian dari 100. Disamping itu perlu diperhatikan khusus klasifikasi 100. Contoh :

100	Pemerintah	(Perincian pertama)
140	Desa/Kelurahan	(Perincian Kedua)
147	Pembangunan Desa	(Perincian Ketiga)
2. Untuk dapat mengklasifikasi surat dengan kode yang paling tepat harus dipahami benar masalah yang dikandungnya, dari sudut pandangan mana masalah dalam surat tidak selalu mudah, pada umumnya

“perihal” surat yang dicantumkan dibagian kiri atas surat memang ada hubungannya dengan masalah surat, tetapi kerap kali “perihal” tersebut merupakan petunjuk yang kurang tepat. Oleh karena itu untuk menentukan kode yang tepat, harus membaca dan memahami masalah yang dikandung dalam surat. Harus selalu diingat, bahwa penemuan kembali surat banyak sekali tergantung pada ketepatan pemberian kode.

3. Banyak surat yang mengandung lebih dari satu masalah. Masalah-masalah itu dapat merupakan masalah yang terpisah satu sama lain atau masalah-masalah yang saling berkaitan. Dalam menghadapi hal yang demikian itu harus berhati-hati memilih masalah yang akan ditentukan menjadi masalah pokok. Masalah yang dipilih haruslah yang paling berat tekanannya, dan harus diyakini benar, bahwa itulah yang akan dikemukakan dalam penemuan kembali arsip.

4. Pemberian kode masalah dapat ditetapkan secara umum atau lebih terperinci. Masalah Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dapat secara berturut-turut diberi kode:

- a. 188.342 Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
- b. 188.34 Peraturan Daerah
- c. 188.3 Peraturan
- d. 188 Peraturan Perundang-undangan

untuk instansi yang besar dapat mempergunakan pemberian kode dimaksud huruf a. Sedangkan makin kecil sesuatu instansi dapat mempergunakan kode dimaksud huruf b atau huruf c yang lebih sederhana dan untuk instansi kecil, misalnya kecamatan dapat mempergunakan kode dimaksud huruf d.

5. Kode Pembantu

Kode Pembantu merupakan kode pelengkap yang tidak dapat dipakai tersendiri, tetapi ditambahkan kode yang memerlukan perincian lebih lanjut.

Dengan ditambahkannya kode pembantu, maka dapat memberikan dimensi ekstra pada arsip.

Contoh:

- 591 Tata Guna Tanah
- .02 Perpetaan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
- .13 Latihan Kerja Masyarakat
- .135 Kurikulum/Silabus

6. Menyusun Kode

Untuk memperoleh Kode yang spesifik, kode-kode masalah yang satu dapat digabungkan dengan kode-kode masalah yang lain.

Cara penggabungan ini dapat dilihat contohnya pada kode 050 dan 700. Perencanaan maupun proyek pembangunan dapat meliputi semua bidang kegiatan, oleh karena itu untuk memperoleh kode yang terperinci maka kode 050 dapat disambungkan dengan seluruh perincian kode dengan pola dari 000 sampai 900

Begitu juga pengawasan (700) yang meliputi bidang apapun dapat digabungkan dengan perincian kode dalam pola klasifikasi.

7. Apabila pada kode ada petunjuk “tambahan perincian” berarti harus menambahkan kode dari pola yang satu ke kode-kode pola yang lain

Contoh I : Proyek Pasar

- 050 - Perencanaan (Proyek)
- 511.2 - Pasar (Bidang Perekonomian)
- 55.112 - Proyek Pasar

Contoh II : Proyek Jembatan

050 - Perencanaan

630 - Jembatan (Bidang Pekerjaan Umum)

056.3 - Proyek Jembatan. Angka 0 paling belakang sesuai. Titik desimal dihilangkan.

8. Ada beberapa masalah yang dapat diklasifikasikan dengan dua macam kode, dan 2 kode yang berlainan itu benar.

a. Peraturan pemerintah tentang pensiun, bisa diklasifikasikan dengan kode 186.31 Peraturan Pemerintah atau 882.08 Peraturan tentang Pensiun.

Masalah pemberhentian dengan pensiun (882), ditambah dengan kode pembantu untuk Peraturan Perundang-undangan (08).

b. Penelitian APPKD, dapat diklasifikasi 070 (Penelitian) atau 142.02 (Penelitian APPKD(142) ditambah dengan kode pembantu untuk penelitian (02).

Kedua cara pengklasifikasian isi sama-sama benar.

Cara ini dimaksud untuk memberikan keleluasan pada penataan berkas. Jika penataan berkas akan dilakukan dengan cara mengelompokkan semua jenis Peraturan Pemerintah, atau semua kegiatan penelitian, maka arsip diklasifikasikan tanpa kode pembantu, tetapi jika penataan berkas dilakukan berdasarkan masalah, maka yang diklasifikasikan ialah masalahnya ditambah kode pembantu.

9. Tunjuk Silang

Jika dijumpai surat yang mengandung dua masalah dan masalah tersebut dan mempunyai tekanan yang sama beratnya, maka dapat diatasi dengan jalan membuat Kartu Tunjuk Silang.

Surat tersebut diklasifikasikan dengan dua kode : Satu kode diisikan pada Kartu Kendali, dan satu kode lagi diisikan pada kartu tunjuk silang. Dengan demikian maka penemuan kembali surat dimaksud dapat dilakukan dari dua arah.

Contoh : Surat tentang “ Pesawahan untuk transmigrasi” dapat diberi kode 521.5 (Pesawahan) dengan menunjuk kode 475 (Transmigrasi) atau sebaliknya. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan Tunjuk Silang terbatas pada masalah-masalah yang memang sangat penting.

10. Indeks Kaitan

Untuk memudahkan menelusuri kode-kode, disusun indeks kaitan. Indeks kaitan ini terdiri dari himpunan nama-nama masalah dan kaitannya yang terdapat dalam pola klasifikasi yang disusun dalam urutan abjad dengan diikuti kodenya.

Dalam indeks kaitan letak kode ada dibelakang masalah, sedangkan dalam pola klasifikasi ada didepan indeks kaitan dimaksud untuk memudahkan mencari masalah dalam arsip.

C. PERINCIAN KODE KLASIFIKASI DAN INDEKS KAITAN

1. Perincian pertama:

000 Umum

100 Pemerintahan

200 Politik

300 Keamanan/Ketertiban

400 Kesejahteraan Rakyat

500 Perekonomian

600 Pekerjaan Umum dan Ketenagaan

700 Pengawasan

800 Kepegawaian

900 Keuangan

2. Perincian kedua:

000	UMUM
010	Urusan Dalam
020	Peralatan
030	Kekayaan Daerah
040	Perpustakaan/ Dokumentasi/ Kearsipan/ Sandi
050	Perencanaan
060	Organisasi/ Ketatalaksanaan
070	Penelitian
080	Konferensi
090	Perjalanan Dinas
100	PEMERINTAHAN
110	Pemerintahan Pusat
120	Pemerintahan Provinsi
130	Pemerintahan Kabupaten/ Kota
140	Pemerintahan Desa/ Kelurahan
150	DPR/ MPR
160	DPRD Provinsi
170	DPRD Kabupaten/ Kota
180	Hukum
190	Hubungan Luar Negeri
200	POLITIK
210	Kepartaian
220	Organisasi Kemasyarakatan
230	Organisasi Profesi dan Fungsional
240	Organisasi Pemuda
250	Organisasi Buruh, Tani dan Nelayan
260	Organisasi Wanita
270	Pemilihan Umum
280	Komisi Pemilihan Umum
290	Badan Pengawas Pemilu
300	KEAMANAN/ KETERTIBAN
310	Pertahanan
320	Kemiliteran
330	Keamanan
340	Pertahanan Sipil
350	Kejahatan
360	Bencana
370	Kecelakaan
380	-
390	-
400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
410	Jaring Pengaman Sosial
420	Pendidikan
430	Kebudayaan
440	Kesehatan
450	Agama
460	Sosial
470	Kependudukan
480	Media Massa
490	-

500	PEREKONOMIAN
510	Perdagangan
520	Pertanian
530	Perindustrian
540	Pertambangan Kesamuderaan
550	Perhubungan
560	Tenaga Kerja
570	Permodalan
580	Perbankan/Moneter
590	Agraria
600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
610	Pengairan
620	Jalan
630	Jembatan
640	Bangunan
650	Tata Kota
660	Tata Lingkungan
670	Ketenagaan
680	Peralatan
690	Air Minum
700	PENGAWASAN
710	Bidang Pemerintahan
720	Bidang Politik
730	Bidang Keamanan/Ketertiban
740	Bidang Kesejahteraan Rakyat
750	Bidang Perekonomian
760	Bidang Pekerjaan Umum
770	-
780	Bidang Kepegawaian
790	Bidang Keuangan
800	KEPEGAWAIAN
810	Pengadaan
820	Pengangkatan dan Mutasi
830	Kedudukan
840	Kesejahteraan
850	Cuti
860	Penilaian
870	Tata Usaha
880	Pemberhentian
890	Pendidikan
900	KEUANGAN
910	Anggaran
920	Otoritasi
930	Verifikasi
940	Pembukuan
950	Perbendaharaan
960	Pembinaan Kebendaharaan
970	Pendapatan
980	-
990	Bendaharawan

KLASIFIKASI ARSIP
Perincian Ketiga
000 UMUM

000	UMUM
001	Lambang
.1	Garuda
.2	Bendera Kebangsaan
.3	Lagu Kebangsaan
.4	Daerah
.41	Provinsi
.42	Kabupaten/Kota
.5	LPND
.6	Lambang Lainnya
002	Tanda Kehormatan/Penghargaan (Untuk Pegawai Lihat Hal. 861.10)
.1	Bintang
.2	Setyalencana
.3	Parasamya Purna Karya Nugraha
.4	Monumen
.5	Penghargaan Secara Adat
.6	Penghargaan lainnya
003	Hari Raya/Besar
.1	Nasional 17 Agustus, Hari pahlawan dan sebagainya
.2	Hari Raya Keagamaan
.3	Hari Ulang Tahun
.4	Hari-hari besar Internasional, Hari-hari besar lainnya
004	Ucapan
.1	Ucapan Terima Kasih
.2	Ucapan Selamat
.3	Ucapan Belasungkawa
.4	Ucapan-ucapan lainnya
005	Undangan
006	Tanda Jabatan
.1	Pamong Praja
.2	Tanda pengenalan
.3	Pejabat lainnya
007	-
008	-
009	-
010	URUSAN DALAM
	Gedung Kantor / Termasuk Instalasi Prasarana Fisik
011	Kantor/Dinas
.1	Prasarana Fisik Pamong Praja/Kantor Dinas
012	Rumah Dinas
.1	Tanah untuk Rumah Dinas
.2	Perabot Rumah Dinas
.3	Rumah Dinas Golongan I
.4	Rumah Dinas Golongan II
.5	Rumah Dinas Golongan III
.6	Rumah/Bangunan Lainnya
.7	Rumah Pejabat Negara
013	Mess/ <i>Guest House</i> /Panti/Wisma/Rumah Susun/Apartemen
014	Jasa Air

- 015 Penerangan Listrik/Jasa Listrik
- 016 Jasa Telepon/Faximile/Internet
- 017 Jasa Keamanan/Ketertiban Kantor
- 018 Jasa Kebersihan Kantor
- 019 Protokol
 - .1 Upacara Bendera
 - .2 Tata Tempat
 - .21 Pemasangan gambar Presiden, Wakil Presiden
 - .22 Pemasangan gambar Gubernur, Wakil Gubernur
 - .23 Pemasangan gambar Bupati, Wakil Bupati, Walikota, Wakil Walikota
 - .3 Audiensi menghadap pimpinan
 - .4 Alamat-alamat kantor dan pejabat
 - .5 Bandir/ Umbul-Umbul, Spanduk
 - .6 Launching
- 020 PERALATAN KANTOR
 - .1 Penawaran
- 021 Alat Tulis Kantor
- 022 Mesin Kantor
- 023 Perabot Kantor
- 024 Alat Angkutan/Kendaraan Dinas
- 025 Pakaian Dinas
- 026 Senjata/Alat Pengaman Kantor
- 027 Pengadaan Barang/Jasa
 - .1 Penunjukan Langsung
 - .2 Pemilihan Langsung
 - .3 Seleksi
 - .4 Lelang
- 028 Inventaris
- 029 -
- 030 KEKAYAAN DAERAH
- 031 Sumber Daya Alam
- 032 Asset Daerah
- 033 Pemanfaatan Kekayaan Daerah
- 034 Pengamanan Kekayaan Daerah
- 035 Penghapusan Asset
- 036 Kekayaan lainnya
- 037 Bangunan
- 038 -
- 039 -
- 040 PERPUSTAKAAN/DOKUMENTASI/KEARSIPAN/SANDI
- 041 Perpustakaan
 - .1 Umum
 - .2 Khusus
 - .3 Perguruan Tinggi
 - .4 Sekolah
 - .5 Keliling
 - .6 Pengadaan Bahan Pustaka
 - .7 Pelayanan
 - .8 Pemeliharaan

- 042 Dokumentasi
- 043 Jaringan Informasi
 - .1 LAN
 - .2 WAN
- 044 -
- 045 Kearsipan
 - .1 Pola Klasifikasi
 - .2 Penataan Berkas
 - .3 Penyusutan
 - .31 Jadwal Retensi Arsip
 - .32 Pemindahan
 - .33 Penyerahan
 - .34 Pemusnahan
 - .4 Pengelolaan Arsip Dinamis
 - .41 Arsip Aktif
 - .42 Arsip Inaktif
 - .43 Arsip Vital
 - .5 Pengelolaan Arsip Statis
 - .51 Akuisisi
 - .52 Pengolahan
 - .53 Preservasi
 - .54 Akses Arsip Statis
 - .6 Pembinaan
- 046 Sandi
- 047 Website
- 048 Pengelolaan Data Elektronik
- 049 Jaringan Komunikasi Data
- 050 PERENCANAAN
- 051 Bidang Pemerintahan
- 052 Bidang Politik
- 053 Bidang Keamanan/Ketertiban
- 054 Bidang Kesejahteraan Rakyat
- 055 Bidang Perekonomian
- 056 Bidang Pekerjaan Umum
- 057 Bidang pengawasan
- 058 Bidang Kepegawaian
- 059 Bidang Keuangan
- 060 ORGANISASI KETATALAKSANAAN
- 061 Organisasi Perangkat Daerah / Instansi Pemerintah
 - .1 Susunan Organisasi dan Tata Kerja
 - .2 Tata Tertib Kantor
- 062 Organisasi / Badan Non Pemerintah
- 063 Organisasi/Badan Internasional
- 064 Organisasi / Badan Semi Pemerintah
- 065 Ketatalaksanaan
 - .1 Tata Naskah Dinas
 - .2 Stempel
 - .21 Stempel Jabatan
 - .22 Stempel Dinas
 - .3 Papan Nama Instansi Pemerintah/Non Pemerintah
 - .4 Organisasi yang diubah, digabung dan dihapus/Likuidasi
- 066 Tata Hubungan Kerja
 - .1 Telaah Tata Hubungan
 - .2 Penyusunan
 - .3 Bimbingan

- 067 Pelayanan Umum/Pelayanan Publik/Analisis
- 068 Standar Pelayanan Minimal
- 069 Analisis Jabatan dan Pengukuran Beban Kerja
 - .1 Analisis Jabatan
 - .2 Hasil Analisis Jabatan
 - .3 Penilaian Jabatan Struktural dan Fungsional
- 070 PENELITIAN
- 071 Riset
- 072 Survey
- 073 Kajian
- 075 Kerja sama penelitian dengan Perguruan Tinggi dan Instansi lain
- 076 Kerja sama penelitian dengan Kementerian Lainnya
- 077 Kerja sama penelitian dengan Pemerintah Daerah Lainnya
- 078 Rekomendasi Penelitian
- 079 Pemaparan / Ekspose
- 080 KONFERENSI/RAPAT/SEMINAR
- 081 Gubernur
- 082 Bupati/Walikota
- 083 Komponen Eselon Lainnya
- 084 Instansi Lain
- 085 Internasional di dalam negeri
- 086 Internasional di luar negeri
- 087
- 088
- 089
- 090 PERJALANAN DINAS
- 091 Perjalanan Presiden/Wakil Presiden di Dalam Negeri
- 092 Perjalanan Menteri di Dalam Negeri
- 093 Perjalanan Pejabat Tinggi (Pejabat Eselon I)
- 094 Perjalanan Pegawai termasuk Pemanggilan Pegawai
- 095 Perjalanan Tamu Asing ke Daerah
- 096 Perjalanan Gubernur/Wakil Gubernur ke Luar Negeri
- 097 Perjalanan Pejabat Daerah Ke Luar Negeri
- 098 Perjalanan Pejabat Negara dan Ke Luar Negeri
- 099 Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri

100 PEMERINTAHAN

- 100 PEMERINTAHAN
Meliputi : Tata praja, legislatif, yudikatif, hubungan luar
- 101 Bentuk Pemerintahan
- 102 Sistem Pemerintahan
- 103 -
- 104 -
- 105 -
- 106 -
- 107 -
- 108 -
- 109 -
- 110 PEMERINTAH PUSAT
- 111 Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
 - .1 Pertanggungjawaban Presiden
 - .2 Amanat Presiden/Amanat Kenegaraan

- 112 Wakil Presiden
Meliputi : Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- 113 Susunan Kabinet
.1 *Reshuffle*
.2 Penunjukan Menteri Ad.interim
.3 Sidang Kabinet
- 114 Kementerian Dalam Negeri
meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
.1 Amanat Menteri Dalam Negeri
- 115 Kementerian Departemen Lainnya
Meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
.1 Amanat Menteri Lainnya
- 116 Lembaga Tinggi Negara
Meliputi ; pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah terima jabatan
- 117 Lembaga Pemerintah Non Kementerian
- 118 Otonomi Daerah/Desentralisasi/Dekonsentrasi
- 119 Kerjasama antar Departemen
- 120 PEMERINTAH DAERAH PROVINSI
.04 Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah
.042 Monografi, tambahkan kode wilayah
.1 Koordinasi
.2 Instansi Provinsi
.21 Organisasi Perangkat Daerah
.22 Instansi Vertikal
.3 Kerja sama antar Provinsi
- 121 Gubernur, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,dsb
.1 Sambutan / Pengarahan / Amanat Gubernur
- 122 Wakil Gubernur, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; pencalonan, pengangkatan, pelantikan, serah terima jabatan,dsb
- 123 Sekretaris Daerah Provinsi, tambahkan kode wilayah
Meliputi : Pencalonan, serah terima jabatan
- 124 Pembentukan/pemekaran wilayah
.1 Pembentukan Daerah Otonom
.2 Perubahan Batas Wilayah
.3 Pemekaran Wilayah
.4 Penambahan Ibukota Provinsi, Pemberian dan penggantian nama kota, daerah, gunung, sungai, pulau, selat, jalan dan sebagainya
- 125 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
.1 Pemerintah Provinsi
.2 Panitia Anggaran Provinsi
.3 Seminar, Lokakarya dan lainnya
- 126 Pembagian Wilayah
- 127 Otonomi Daerah
- 128 Swapraja/Penataan Wilayah/Daerah
- 129 Tugas Pembantuan
- 130 PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
.04 Laporan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
.1 Koordinasi
.2 Instansi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota

- .21 Dinas Otonom
- .22 Instansi Vertikal
- .3 Kerjasama antar Kabupaten/Kota
- 131 Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- .1 Berita acara jabatan dan memori Bupati/walikota
- .2 Sambutan/pengarahan/amanat/Bupati/Walikota
- 132 Wakil Bupati/Wali Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya
- 133 Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota, tambahkan kode wilayah
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya
- 134 Forum Koordinasi Pemerintah di Daerah
- .1 MUSPIDA
- .2 Forum PAN (Panitia Anggaran Nasional)
- .3 Forum Koordinasi Lainnya
- .4 Kerja sama antara kabupaten/kota
- 135 Pembentukan/pemekaran Wilayah
- .1 Pembentukan Daerah Otonom
- .2 Perubahan Batas Wilayah
- .3 Pemekaran Wilayah
- .4 Permasalah Batas Wilayah
- .5 Pemindahan Ibukota Kabupaten/Kota
- .6 Pemberian dan Penggantian
- .7 Pemetaan Wilayah
- 136 Pembagian Wilayah
- 137 Penyerahan Urusan / Otonomi Daerah / Otonomi Khusus
- 138 Pemerintahan Kecamatan
- .1 Sambutan/pengarahan/Amanat Camat
- .2 Pembentukan Kecamatan
- .3 Pemekaran
- .4 Perluasan/Perubahan Batas Kecamatan
- .5 Pemindahan Ibukota Kecamatan
- 139 Likuidasi Dinas/Badan/Lembaga Provinsi dan Kabupaten/Kota
- 140 PEMERINTAHAN DESA/KELURAHAN
- 141 Pemerintahan Desa
- .1 Kepala Desa
Meliputi ; Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah, serah terima jabatan, pemberhentian,dan sebagainya.
- .2 Badan Perwakilan Desa
Meliputi ; Pembentukan, Keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan BPD.
- .3 Perangkat Desa
- .31 Sekretaris Desa
Meliputi ; pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara.
- .32 Kepala Dusun
Meliputi ; pencalonan, penyeleksian, pengangkatan, pemberhentian sementara.
- .33 Kepala Urusan
- 142 APPKD (Anggaran Pendapatan Pengeluaran Keuangan Desa)
- .1 Rutin (termasuk penghasilan Pamong Praja)
- .2 Pembangunan
- .3 Anggaran Belanja Tambahan

- .4 Pendapatan Desa
- .41 Urusan Desa
- .42 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat
- .43 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Provinsi
- .44 Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota
- .45 Penerimaan yang berasal dari Pajak dan Retribusi Daerah yang diserahkan kepada Desa
- .46 Penerimaan dari pemilik-pemilik tanah yang berdomisili di luar Desa
- .47 Pendapatan asli Desa
- .48 Penerimaan lain-lain yang syah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku
- .49 Hasil dari gotong royong masyarakat
- 143 Kekayaan Desa
 - .1 Tanah Hak Pakai Desa
 - .11 Tanah Bengkok
 - .12 Tanah Titisara
 - .13 Tanah Pengangonan
 - .14 Tanah Desa Lainnya
 - .2 Jalan Desa
 - .3 Bangunan Desa
 - .4 Kekayaan Desa Lainnya
- 144 Lembaga-lembaga Desa
 - .1 LMD/BPD
 - .2 LKMD/LPM
- 145 Administrasi Desa
- 146 Kewilayahan
 - .1 Pembentukan Desa/Kelurahan
 - .2 Pemekaran Desa/Kelurahan
 - .3 Perubahan batas wilayah/perluasan Desa/Kelurahan
 - .4 Perubahan nama Desa/Kelurahan
 - .5 Permasalah batas Desa
 - .6 Penyatuan Desa/Kelurahan
 - .7 Penghapusan Desa/Kelurahan
- 147 Pemberdayaan Masyarakat dan Pembangunan Desa
 - .1 Pembinaan usaha gotong royong
 - .11 Swadaya gotong royong
 - .111 Penataan gotong royong
 - .112 Gotong royong dinamis
 - .113 Gotong royong statis
 - .114 Pungutan
 - .12 Lembaga Sosial Desa (LDS)
 - .121 Pembinaan
 - .122 Klasifikasi
 - .123 Proyek
 - .124 Musyawarah
 - .13 Latihan Kerja Masyarakat
 - .131 Kader Masyarakat
 - .132 Kuliah Kerja Nyata (KKN)
 - .133 Pusat Latihan
 - .134 Kursus-kursus
 - .135 Kurikulum/Silabus
 - .136 Keterampilan
 - .137 Pramuka

.14	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga
.141	Program
.142	Pembinaan Organisasi
.143	Kegiatan
.15	Penyuluhan
.151	Publikasi
.152	Peragaan
.153	Sosio Drama
.154	Siaran Pedesaan
.155	Penyuluhan Lapangan
.16	Kelembagaan
.161	Kelompok Tani
.162	Rukun Tani
.163	Subak
.164	Dharma Tirta
.165	Mitra Cai
.2	Perekonomian Desa
.21	Produksi Desa
.211	Pengolahan
.212	Pemasaran
.222	Inventarisasi Desa
.223	Perkembangan/pelaksanaan
.224	Bantuan/Simulasi
.225	Petunjuk/Pembinaan pelaksanaan
.23	Koperasi Desa
.231	Badan Usaha Unit Desa (BUUD)
.232	Koperasi Unit Desa (KUD)
.24	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.241	Jumlah Desa yang diberi bantuan
.242	Pengarahan
.243	Pusat
.244	Daerah
.25	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.251	Pusat
.252	Daerah
.26	Pelaksana bantuan Pembangunan Desa
.261	Bantuan Langsung
.262	Bantuan Kereserasian
.263	Bantuan Juara Lomba Desa
.3	Prasarana Desa
.31	Pembinaan
.331	Lokasi
.332	Diskusi
.333	Pelaksanaan
.34	Masyarakat Pra Desa
.341	Pembinaan
.342	Penyuluhan
.35	Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa
.351	Rumah Sehat
.352	Proyek Perintis
.353	Pelaksana
.354	Pengembangan
.355	Perbaikan Kampung
.4	Pengembangan Desa
.41	Tingkat Perkembangan Desa
.411	Jumlah Desa

- .4112 Pemekaran Desa
- .4113 Pembentukan Desa Baru
- .4114 Evaluasi
- .4115 Bagan
- .42 Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP)
- .421 Penyusunan Program
- .422 Lokasi UDKP
- .423 Pelaksanaan
- .424 Bimbingan/Pembinaan
- .425 Evaluasi
- .43 Tata Desa
- .431 Inventarisasi
- .432 Penyusunan Pola Tata Desa
- .433 Aplikasi Tata Desa
- .434 Evaluasi
- .44 Perlombaan Desa
- .441 Pedoman Perlombaan Desa
- .442 Penilaian
- .443 Kejujuran
- .444 Piagam
- .5 Koordinasi
- .51 Sektor Khusus (K)
- .52 Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
- .53 Team Koordinasi Pusat
- .54 Kerja Sama
- .541 Luar Negeri
- .542 Perguruan Tinggi
- .543 Departemen/Lembaga Non Departemen
- 148 Pemerintahan Kelurahan
 - .1 Kepala Kelurahan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.
 - .2 Sekretaris Kelurahan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.
 - .3 Kepala Lingkungan meliputi ; pengangkatan, pemberhentian, dan pemberhentian sementara.
 - .4 Administrasi Kelurahan
 - .5 Lembaga-lembaga Tingkat Kelurahan
- 148 Lembaga Kelurahan
 - .1 Rukun Tetangga
 - .2 Rukun Warga
- 150 MPR/DPR/DPD
- 151 Keanggotaan MPR
 - .1 Pencalonan
 - .2 Pengangkatan
 - .3 Pemberhentian
 - .31 *Recall*
 - .32 Meninggal
 - .4 Pergantian Antar Waktu
 - .5 Pelanggaran
- 152 Persidangan MPR
- 153 Kesejahteraan
 - .1 Keuangan
 - .2 Penghargaan

154	Hak/Saran/Pendapat MPR
155	Keanggotaan DPR/DPD
	.1 Pecalonan
	.2 Pengangkatan
	.3 Pemberhentian
	.31 Recall
	.32 Meninggal
	.4 Pergantian Antar Waktu
	.5 Pelanggaran
156	Persidangan DPR/DPD
	.1 Sidang Pleno
	.2 Dengar Pendapat
	.3 Rapat Komisi
	.4 Reses
	.5 Rapat Fraksi
157	Kesejahteraan
	.1 Keuangan
	.2 Penghargaan
158	Jawaban Pemerintah
159	Hak DPR
	.1 Amandemen
	.2 Angket
	.3 Budget
	.4 Interplasi
160	DPRD PROVINSI
161	Keanggotaan
	.1 Pecalonan
	.2 Pengangkatan
	.3 Pemberhentian
	.31 <i>Recall</i>
	.32 Meninggal
	.4 Pelanggaran
162	Persidangan
	.1 Tata Tertib
	.2 Sidang Pleno
	.3 Dengar Pendapat / Hearing / Dialog
	.4 Rapat-rapat meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi, Panitia Khusus, Panitia Anggaran dan sebagainya.
	.5 Reses
	.6 Peninjauan Studi Banding
	.7 Kunjungan Kerja
163	Kesejahteraan
	.1 Keuangan
	.11 Gaji/Honor
	.12 Tunjangan
	.2 Penghargaan
164	Hak DPRD
	.1 Budget
	.2 Interplasi
	.3 Amandemen
	.4 Angket
	.5 Lainnya
165	Sekretaris DPRD
166	Alat Kelengkapan Dewan
	.1 Badan Anggaran
	.2 Badan Kehormatan

	.3	Fraksi
	.4	Komisi
	.5	Lainnya
167		Tenaga Ahli DPRD
168		-
169		-
170		DPRD KABUPATEN/KOTA
171		Keanggotaan
	.1	Pencalonan
	.2	Pengangkatan
	.3	Pemberhentian
	.31	<i>Recall</i>
	.32	Meninggal
	.4	Pelanggaran
172		Persidangan
	.1	Tata Tertib
	.2	Sidang Pleno
	.3	Dengar Pendapat
	.4	Rapar-rapat meliputi ; Rapat Panitia Musyawarah, Komisi, Fraksi, Panitia Anggaran dan Sebagainya.
	.5	Reses
	.6	Peninjauan Studi Banding
173		Kesejahteraan
	.1	Keuangan
	.2	Penghargaan
174		Hak/Saran/Pendapat
175		Sekretaris DPRD Kabupaten/Kota
176		-
177		-
178		-
179		-
180		HUKUM
	.1	Konstitusi
	.11	Dasar Hukum
	.12	Undang-Undang Dasar
	.2	Amandemen
	.3	Amnesti/Abolisi/Grasi
181		Perdata
	.1	Perdata
	.2	Rumah
	.3	Utang/Piutang
	.31	Gadai
	.32	Hipotik
	.4	Notaris
182		Pidana
	.1	Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)
183		Peradilan
	.1	Jenis-jenis Peradilan
	.11	Peradilan Umum
	.111	Peradilan Negeri Tingkat Pertama
	.112	Pengadilan Tinggi
	.113	Mahkamah Agung
	.114	Mahkamah Konstitusi
	.12	Peradilan Agama Islam
	.121	Peradilan Agama Islam Tingkat Pertama
	.122	Pengadilan Tinggi Agama Islam

.123	Mahkamah Agung Agama Islam
.13	Peradilan Militer
.131	Mahkamah Militer Tingkat Pertama
.132	Mahkamah Militer Tinggi
.133	Mahkamah Militer Agung
.14	Peradilan Tata Usaha Negara
.141	Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama
.142	Peradilan Tata Usaha Negara Tinggi
.143	Peradilan Tata Usaha Negara Agung
.15	Peradilan Koneksitas
.2	Upaya-Upaya Hukum
.21	Banding
.22	Kasasi
.23	Derden Verzet
.24	Peninjauan Kembali
.3	Eksekusi
.31	Penyitaan Lahan/Bangunan
.4	Pembinaan Hukum
.41	Pembinaan Kesadaran Hukum (KADARKUM)
.5	Bantuan Hukum
.51	Lembaga Bantuan Hukum
184	Hukum Internasional
185	Imigrasi
.1	<i>Visa</i>
.2	<i>Paspor</i>
.3	<i>Exit/Permit</i>
.4	<i>Reentry</i>
.5	Lintas Batas/Batas Antar Negara
186	Kepenjaraan/Lembaga Pemasyarakatan
187	Kejaksaan
.1	<i>Saksi</i>
.2	<i>Terdakwa</i>
188	Peraturan Perundang-Undangan
.1	TAP MPR
.2	Undang-Undang
.3	Peraturan
.31	Peraturan Pemerintah
.32	Peraturan Menteri
.33	Peraturan Lembaga Non Departemen
.34	Peraturan Daerah
.341	Peraturan Daerah Provinsi
.342	Peraturan Daerah Kabupaten/Kota
.4	Keputusan
.41	Presiden
.42	Menteri
.43	Lembaga Non Departemen
.44	Gubernur
.45	Bupati/Walikota
.5	Instruksi
.51	Presiden
.52	Menteri
.53	Lembaga Non Departemen
.54	Gubernur
.55	Bupati/Walikota

189	Hukum Adat
.1	Tokoh Adat/Masyarakat
190	HUBUNGAN LUAR NEGERI
191	Perwakilan Asing
193	Kerjasama Dengan Negara Asing
.1	Bilateral
.2	Multilateral
.3	Regional (ASEAN)
.4	Internasional
194	Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
.1	Kedutaan
.2	Konsulat
.3	Kuasa Usaha
.4	Atase
195	PBB
.1	UNESCO
.2	UNICEF
.3	FAO
.4	UNHCR
.5	WHO
.6	Organisasi lainnya
196	Laporan Luar Negeri
197	Hutang Luar Negeri (PHLN)/ <i>LOAN</i>
198	-
199	-

200 POLITIK

200	POLITIK
201	Kebijaksanaan Umum
202	Orde Lama (1945-1965)
203	Orde Baru (1966-200)
204	Orde Reformasi (2001-2004)
205	Orde Persatuan (2004)
206	Politik Dalam Negeri
207	Kewaspadaan Nasional
208	-
209	-
210	KEPARTAIAN
211	Lambang partai
212	Kartu Tanda Anggota
213	Bantuan Keuangan Parpol
214	Program Partai
215	AD / ART
216	Pengurus Partai
.1	Pimpinan Pusat
.2	Pimpinan Wilayah
.3	Pimpinan Cabang
.4	Pimpinan Anak Cabang
.5	Pimpinan Ranting
217	Pertemuan Partai
.1	Muktamar
.2	Munas
.3	Kongres

218	Kaderisasi Partai
219	Pembinaan Parpol
220	ORGANISASI KEMASYARAKATAN
221	Ormas Berdasarkan Perjuangan
	.1 Perintis Kemerdekaan
	.2 Angkatan 45
	.3 Veteran
222	Ormas Berdasarkan Kekaryaan
	.1 PEPABRI
	.2 Wreda Tama
223	Ormas Berdasarkan Kerohanian
	.1 Nahdatul Ulama
	.2 Muhammadiyah
	.3 Persis
	.4 PGI
	.5 dan lain-lainnya
224	Lembaga Adat
225	Lembaga Swadaya Masyarakat
226	Ormas Berdasarkan Kedaerahan
	.1 Paguyuban Pasundan
	.2 dan lain-lainnya
227	Pembinaan dan Bantuan Keuangan Ormas
228	-
229	-
230	ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL
231	Organisasi Kesehatan
	.1 Ikatan Dokter Indonesia
	.2 Ikatan Bidan Indonesia
	.3 Organisasi Kesehatan lainnya
232	Organisasi Guru
	.1 Persatuan Guru Republik Indonesia
	.2 Organisasi Guru Swasta / Organisasi Guru lainnya
233	Organisasi sarjana
	.1 Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia
	.2 Persatuan Insinyur Indonesia
	.3 Persatuan Sarjana Muda Indonesia
	.4 Masyarakat Ilmu Pemerintah Indonesia
234	Organisasi Advokat/Pengacara
235	Lembaga Bantuan Hukum
236	Korps Pegawai Republik Indonesia
237	Organisasi Wartawan Indonesia
	.1 Persatuan wartawan Indonesia
	.2 Asosiasi Jurnalis Indonesia
	.3 Organisasi Wartawan lainnya
238	Organisasi Profesi Fungsional
	.1 Asosiasi Arsiparis Indonesia
	.2 Ikatan Pustakawan Indonesia
239	Organisasi profesi dan fungsional lainnya
240	ORGANISASI PEMUDA
241	Komite Nasional Pemuda Indonesia
242	Organisasi Mahasiswa
243	Organisasi Pelajar
244	Organisasi Pemuda Keagamaan
245	Organisasi Pemuda Kepartaian
246	Organisasi Pemuda lainnya

247	-
248	-
249	-
250	ORGANISASI BURUH, TANI, NELAYAN DAN ANGKUTAN
251	Organisasi Pekerja/Buruh
	.1 Nasional
	.2 Internasional
252	Organisasi Petani
253	Organisasi Nelayan
254	Organisasi Angkutan Darat
255	Organisasi Angkutan Laut
256	Organisasi Angkutan Udara
257	-
258	-
259	-
260	ORGANISASI WANITA
261	Dharma Wanita Persatuan
262	Kongres Wanita Indonesia
263	Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia
264	Persit Kartika Candra
265	Via Ardia Gharini
266	Jala Senasti
267	Bhayangkari
268	Organisasi Wanita lainnya
269	PKK
270	PEMILIHAN UMUM
271	Pencalonan
272	Nomor Urut Partai/Tanda Gambar
273	Kampanye
274	Petugas Pemilu
275	Pemilih/Daftar Pemilih
276	Sarana
	1. TPS
	2. Kendaraan
	3. Surat Suara
	4. Kotak Suara
	5. Dana
277	Pemungutan/Perhitungan Suara
278	Penetapan Hasil Pemilu
279	Penetapan perolehan jumlah kursi dan calon terpilih
280	KOMISI PEMILIHAN UMUM
281	Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
282	Komisi Pemilihan Umum Provinsi
283	Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota
284	Panitia Pemilihan Kecamatan
285	Panitia Pemungutan Suara
286	Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara
287	Petugas Pemutakhiran Data Pemilih
288	Sengketa Pemilu
289	-
290	BADAN PENGAWAS PEMILU
291	Badan Pengawas Pemilu Indonesia
292	Badan Pengawas Pemilu Provinsi
293	Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota
294	Badan Pengawas Pemilu Kecamatan
295	Pengawas Pemilu Lapangan

296	Pengawas Pemilu Luar Negeri
297	Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu
298	Dewan Kehormatan Provinsi
299	-

300 KEAMANAN/KETERTIBAN

300	KEAMANAN/KETERTIBAN
301	Keamanan
302	Ketertiban
303	Penegakan Peraturan Perundang-undangan Daerah
	.1 Pembinaan Pengawasan dan Penyuluhan
	.2 Penyelidikan dan Penyidikan
304	Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
	.1 Operasi dan Pengendalian
	.2 Kerja sama
305	Sumber Daya Aparatur Keamanan dan Ketertiban
	.1 Pelatihan Dasar
	.2 Pelatihan Teknis
306	Perlindungan Masyarakat
	.1 Satuan Perlindungan Masyarakat
	.2 Bina Potensi Masyarakat
307	-
308	-
309	-
310	PERTAHANAN
311	Darat
312	Laut
313	Udara
314	Intelejen
315	Sistem Pertahanan
316	-
317	-
318	-
319	-
320	KEMILITERAN
321	Latihan Militer
322	Wajib Militer
323	Operasi Militer
324	Kekaryaannya TNI, Pejabat Sipil dari TNI
325	Tentara Nasional Indonesia
	.1 Angkatan Darat
	.2 Angkatan Laut
	.3 Angkatan Udara
326	Alutsista
327	Bela Negara
328	Sarana dan Prasarana Militer
329	-
330	KEAMANAN
331	Kepolisian
	.1 Polri
	.2 Polisi Pamong Praja
	.3 Polisi Hutan
	.4 Polisi Khusus
	.5 Polisi Wisata

332	Huru-Hara/Demonstrasi
333	Senjata api/tajam
334	Bahan Peledak
335	Perjudian
336	Surat-surat kaleng
337	Pengaduan
338	Himbauan/Larangan tentang Keamanan dan Ketertiban
339	Terosisme
340	PERTAHANAN SIPIL
.1	Kebijaksanaan pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip
.11	Pengangkatan/ Pemberhentian Anggota Hansip
.12	Pengerahan dan Pengendalian Hansip
.13	Kegiatan Pelaksanaan Matrik Hansip dan Menwa
.14	Pembinaan Anggota Hansip/ Linmas
.15	Penghargaan Anggota Hansip
.16	Hansip/ Linmas Lanjut Usia
.17	Data Matrik Hansip dan Menwa
.18	Pendidikan/ Latihan Hansip dan Menwa
.19	Latihan Keterampilan Pamswakarsa
.2	Orientasi Kesadaran Bela Negara bagi Tokoh MAsyarakat
.21	Orientasi Kesadaran Bela Negara Bagi Tokoh
.22	Pemberian tali asih bagi anggota
341	Perlindungan sipil
342	Latihan Dasar
343	Suskalak A
344	Suskalak B
345	Suspim
346	Suskapim
347	-
348	-
349	-
350	KEJAHATAN
351	Makar/Pemberontak
352	Pembunuhan
353	Penganiayaan/Pencurian
.1	Bunuh Diri
.2	Keracunan
354	Subversi/penyelundupan/Narkotika
355	Pemalsuan
356	Korupsi/Penyelewengan/Penyalahgunaan Jabatan/KKN
357	Pemeriksaan/Pelecehan Seksual
358	Kenakalan
359	Kejahatan Lainnya
360	BENCANA
361	Gunung Berapi
362	Gempa
363	Angin Topan
364	Tanah Longsor
365	Kekeringan
366	Banjir
367	Kebakaran
368	Tsunami
369	Rob (Banjir Air Laut)

370	KECELAKAAN
371	Kecelakaan Darat
372	Kecelakaan Laut
373	Kecelakaan Udara
374	Sungai/Danau
375	Kecelakaan Lainnya
376	-
377	-
378	-
379	-
380	PENANGGULANGAN BENCANA
381	-
382	-
384	-
385	-
386	-
387	-
388	-
389	-
390	SEARCH AND RESEARCH (SAR)
391	-
392	-
393	-
394	-
395	-
396	-
397	-
398	-
399	-

400 KESEJAHTERAAN RAKYAT

400	KESEJAHTERAAN RAKYAT
401	Keluarga Pra Sejahtera
402	PNPM Mandiri Pedesaan
402	Jaminan Kesehatan Masyarakat
403	Subsidi
404	Program Raskin
405	Bantuan Langsung Tunai
406	Jaminan Sosial
407	Corporate Social Responsibility
408	-
409	-
410	PEMBANGUNAN DESA
411	Pembinaan usaha gotong royong
.1	Swadaya gotong royong
.11	Penataan gotong royong
.12	Gotong royomh dinamis
.13	gotong royong statis
.14	pungutan
.2	Lembaga soosial desa
.21	Pembinaan
.22	Klasifikasi
.23	Proyek
.24	Musyawarah

.3	Latihan kerja masyarakat
.31	Kader masyarakat
.32	Kuliah kerja nyata (KKN)
.33	Pusat latihan
.34	Kursus-kursus
.35	Kurikulum/syllabus
.36	Keterampilan
.37	Pramuka
.4	Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (pkk)
.41	Program
.42	Pembinaan organisasi
.43	Kegiatan
.5	Penyuluhan
.51	Publikasi
.52	Peragaan
.53	Sosio drama
.54	Siaran perdesaan
.55	Penyuluhan lapangan
.6	Kelembagaan desa
.61	Kelompok Tani
.62	Rukun Tani
.63	Subak
.64	Dharma Tirta
412	Perekonomian Desa
.1	Produksi desa
.11	Pengolahan
.12	Pemasaran
.2	Keuangan desa
.21	Perkreditan desa
.22	Inventarisasi data
.23	Perkembangan/pelaksanaan
.24	Bantuan/Stimulans
.25	Petunjuk/Pembinaan Pelaksanaan
.3	Koperasi Desa
.31	Badan Usaha Unit Desa
.32	Koperasi Usaha Desa
.4	Penataan Bantuan Pembangunan Desa
.41	Jumlah Desa Yang Diberi Bantuan
.42	Pengarahan
.43	Pusat
.44	Daerah
.5	Alokasi Bantuan Pembangunan Desa
.51	Pusat
.52	Daerah
.6	Pelaksanaan Bantuan Pembangunan Desa
.61	Bantuan Langsung
.62	Bantuan Keserasian
.63	Bantuan Juara Lomba Desa
413	Prasarana Desa
.1	Prasarana Desa
.11	Pembinaan
.12	Pembinaan Teknis
.2	Pemukiman Kembali Penduduk
.21	Lokasi
.22	Diskusi
.23	Pelaksanaan

.3	Masyarakat Pradesa
.31	Pembinaan
.32	Penyuluhan
.4	Pemugaran Perumahan Dan Lingkungan Desa
.41	Rumah Sehat
.42	Proyek Perintis
.43	Pelaksanaan
.44	Pengembangan
.45	Perbaikan Kampung
414	Pengembangan Desa
.1	Tingkat Pengembangan Desa
.11	Jumlah Desa
.12	Pemekaran Desa
.13	Pembentukan Desa Baru
.14	Evaluasi
.15	Bagan
.2	Unit Desa Kerja Pembangunan (UDKP)
.21	Penyuluhan Program
.22	Lokasi UDKP
.23	Pelaksanaan
.24	Bimbingan/Pembinaan
.25	Evaluasi
.3	Tata Desa
.31	Inventarisasi
.32	Penyusunan Pola Tata Desa
.33	Aplikasi Tata Desa
.34	Pemetaan
.35	Pedoman Pelaksanaan
.36	Evaluasi
.4	Perlombaan Desa
.41	Pedoman
.42	Penilaian
.43	Kejuaraan
.44	Piagam
415	Koordinasi
.1	Sektor Khusus
.2	Rapat Koordinasi Horizontal (RKH)
.3	Tim Koordinasi Pusat (TKP)
.4	Kerjasama
.41	Luar Negeri (UNICEF)
.42	Perguruan Tinggi
.43	Kementrian /Lembaga Non Kementrian
416	-
417	-
418	-
419	-
420	PENDIDIKAN
.1	pendidikan khusus klasifikasi disini pendidikan
421	Sekolah
.1	Pra sekolah Pendidikan Usia Dini
.2	Sekolah Dasar (SD)
.3	Sekolah Menengah
.4	Sekolah Tinggi
.5	Sekolah Kejuruan
.6	Kegiatan sekolah

- .7 Kegiatan Pelajar dan Mahasiswa
- .71 Reuni, Dharmawisata
- .72 Pelajar/Mahasiswa Teladan
- .73 Resimen Mahasiswa
- .8 Sekolah Pendidikan Luar Biasa
- .81 Resimen Mahasiswa
- .9 Sekolah Pendidikan Luar Sekolah / Pemberantasan Buta Huruf
- 422 Administrasi Sekolah
 - .1 Persyaratan Masuk Sekolah, testing, pendaftaran, Ospek
 - .2 Tahun Ajaran
 - .3 Hari libur
 - .4 Uang Sekolah/SPP
 - .5 Beasiswa
 - .6 Kurikulum
- 423 Metoda Belajar
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium/Seminar
 - .3 Diskusi
 - .4 Kuliah Lapangan, Kuliah Kerja Nyata
 - .5 Kurikulum
 - .6 Karya Tulis/Skripsi/Tesis/Desertasi
 - .7 Ujian
- 424 Tenaga Pengajar, Guru, Dosen, Pelatih
- 425 Sarana Pendidikan
 - .1 Gedung
 - .11 Gedung Sekolah
 - .12 Kampus
 - .13 Pusat Kegiatan Mahasiswa
 - .14 Perpustakaan
 - .15 Laboratorium
 - .2 Buku Pelajaran
 - .3 Perlengkapan Sekolah
- 426 Keolahragaan

Klasifikasi disini : PON, Porsade, Olimpiade dan sebagainya

 - .1 Cabang Olah Raga termasuk Atlet
 - .2 Sarana Olah Raga
 - .21 Gedung Olahraga
 - .22 Stadion
 - .23 Lapangan
 - .24 Kolam Renang
 - .3 Pesta Olah Raga
 - .4 KONI
- 427 Kepemudaan
 - Meliputi ; Organisasi, sarana dan kegiatan remaja
 - Klasifikasi disini : Gelanggang Remaja/Gelanggang Generasi Muda
- 428 Kepramukaan
- 429 Pendidikan Kedinasan
- 430 KEBUDAYAAN
- 431 Kesenian
 - .1 Cabang Kesenian
 - .2 Sarana Kesenian
 - .3 Prasarana
 - .31 Gedung Kesenian
 - .32 Padepokan

	.4	Usaha Pertunjukan
432		Kepurbakalaan
	.1	Museum
	.2	Peninggalan Kuno
	.21	Candi, Peninggalan Kuno termasuk pemugaran
	.22	Benda
433		Sejarah dan Nilai Tradisional
434		Bahasa
	.1	Bahasa Indonesia
	.2	Bahasa Daerah
	.3	Bahasa Asing
435		Usaha Pertunjukan, Hiburan, Kesenangan
	.1	Upacara Adat
	.2	Pakaian Adat
	.3	Rumah Adat
436		Kepercayaan
437		Adat Tradisional, Pelestarian dan Revitalisasi Kebudayaan
438		Perlindungan Kebudayaan
439		Kearifan Lokal Kesenian
440		KESEHATAN
441		Pembinaan Kesehatan
	.1	Gizi
	.2	Mata
	.3	Jiwa
	.4	Penyakit Dalam, Kanker
	.5	UKS (Usaha Kesehatan Sekolah)
	.6	Perawatan
	.7	Penyuluhan Kesehatan Masyarakat (PKM)
	.8	PIN (Pekan Imunisasi Nasional)
442		Obat-Obatan
	.1	Pengadaan
	.2	Penyimpanan
443		Penyakit Menular, Pemberantasan Penyakit
	.1	Pencegahan
	.2	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular
		Langsung (P2ML)
	.21	Kusta
	.22	Kelamin
	.23	Frambosia
	.24	TBC
	.25	HIV, AIDS
	.3	Epidemiology dan Karantina (Epidika)
	.31	Kolera
	.32	Imunisasi
	.33	Survailense
	.4	Pemberantasan dan Pencegahan Penyakit Menular Sumber
		Binatang (P2B)
	.41	Malaria
	.42	Dengue (Demam berdarah)
	.43	Filaria
	.44	Serangga
	.45	Rabies
	.46	Antraks
	.47	Flu Burung

.5	Sanitasi
.41	Tempat Pembuatan dan Penjualan Makanan dan Minuman.
.42	Sarana Air Minum dan Jamban Keluarga (Samijaga)
.43	Pestisida
.44	Pencemaran Lingkungan
.6	Hygiene
.61	A. Pektoris
.62	IMA
.63	Hipertensi
.64	Stroke
.65	Diabetes Melitus (DM)
.66	CA. Service
.67	CA. Mammae
.68	CA. Hepak
.69	CA. Paru
.7	Dekompensasiokordis
.71	PPOM
.72	Asma
.73	Kecelakaan Lalu Lintas
.74	Psikosis
444	Gizi
.1	Kekurangan Makanan, Kelaparan, Busung Lapar
.2	Keracunan Makanan
.3	Menu Makanan Rakyat
.4	Badan Perbaikan Gizi Daerah (BPGD)
.5	Program Makanan Tambahan Amal Sekolah (PMTAS)
445	Rumah Sakit / Poliklinik
.1	RSUP
.2	Rumah Sakit Jiwa
.3	Rumah Sakit Mata
.4	Puskesmas
.5	Balai Kesehatan (Poliklinik)
.6	Balai Kesehatan Ibu dan Anak
.7	Rumah Sakit Bersalin
.8	Posyandu
.9	Rumah Sakit Paru
446	Tenaga Medis/Paramedis
447	Alat Medis
.1	Pengadaan Alat Kesehatan
.2	Penyimpanan Alat Kesehatan
.3	Standarisasi Alat Kesehatan
.4	Penghapusan Alat Kesehatan
448	Pengobatan Tradisional
.1	Pijat
.2	Tusuk Jarum
.3	Jamu Tradisional
.4	Dukun
449	Apotik/Toko Obat
.1	Surat Izin
.2	Surat Izin Kerja
450	AGAMA
451	Islam
.1	Peribadatan
.11	Sholat

.12	Zakat
.13	Puasa
.14	MTQ
.15	Haji
.16	Umroh
.2	Rumah Ibadah / Masjid/Mushola
.3	Tokoh Agama
.4	Pendidikan Agama Islam
.41	Tinggi
.42	Menengah
.43	Dasar
.44	Pondok Pesantren
.45	Gedung Sekolah
.46	Tenaga Pengajar
.47	Buku Agama
.48	Dakwah
.49	Organisasi/Lembaga Pendidikan
.5	Harta Agama (Wakaf, Baitul Maal dsb)
.6	Peradilan Agama
.7	Organisasi Keagamaan bukan Politik Majelis Ulama
.8	Mazhab
452	Protestan
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadat/Gereja
.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Domine
.4	Mazhab
.5	Organisasi Gerejani
453	Katolik
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadat/Gereja
.3	Tokoh Agama, Rohaniawan, Pendeta, Pastor
.4	Mazhab
.5	Organisasi Gerejani
454	Hindu
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadat
.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
.4	Mazhab
.5	Organisasi Agama Hindu
455	Budha
.1	Peribadatan
.2	Rumah Ibadat
.3	Tokoh Agama, Rokhaniawan
.4	Mazhab
.5	Organisasi Keagamaan
456	Konghucu
457	-
458	-
459	-
460	SOSIAL
461	Rehabilitasi Penderita Cacat
.1	Cacat Mata
.2	Cacat Tubuh
.3	Cacat Mental

462	.4	Bisu/Tuli
		Tuna Sosial
	.1	Gelandangan
	.2	Pengemis
	.3	Tuna Susila
	.4	Anak Nakal dan Narkoba
463		Kesejahteraan Anak/Keluarga
	.1	Anak Putus Sekolah
	.2	Ibu Teladan
	.3	Anak Asuh
464		Pembinaan Pahlawan
		Meliputi : Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
	.1	Pahlawan
	.2	Perintis Kemerdekaan
		Meliputi : Penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan jandanya.
	.3	Cacat Veteran
465		Kesejahteraan Sosial
	.1	Lanjut Usia
	.2	Korban Kekacauan, Pengungsi, Repatriasi, Korban Tindak Kekerasan
466		Sumbangan Sosial
		Meliputi : Penyelenggaraan Undian, Ketangkasan, Bazaar, dsb
	.1	Korban Bencana
	.2	Pencarian Dana Untuk Sumbangan
	.3	Panti Asuhan
	.4	Yayasan/Panti Lainnya
467		Bimbingan Sosial
		Meliputi : Bimbingan Pendidikan, Kesehatan, Pemukiman dsb
	.1	Masyarakat Suku Terasing
468		PMI
469		Makam
	.1	Umum
	.2	Pahlawan
	.3	Khusus Keluarga, Raja
	.4	Krematorium
470		KEPENDUDUKAN
471		Pendaftaran penduduk
	.1	Identitas Penduduk
	.11	Biodata
	.12	Nomor Induk Kependudukan
	.13	Kartu Tanda Penduduk
	.14	Kartu Keluarga
	.15	Advokasi Identitas Penduduk
	.2	Perpindahan Penduduk Dalam Wilayah Indonesia
	.21	Perpindahan Penduduk WNI
	.22	Perpindahan Penduduk WNA Dalam Wilayah Indonesia
	.23	Perpindahan Penduduk WNA Dan WNI Tinggal Sementara
	.24	Daerah Terbelakang/Tertinggal
	.25	Bedol Desa
	.3	Perpindahan Penduduk Antar Negara
	.31	Penduduk Indonesia Ke Luar Negeri
	.32	Orang Asing Tinggal Sementara

.33	Orang Asing Tinggal Tetap
.34	Perpindahan Penduduk Antar Negara Di Wilayah
Pembatasan	Antar Negara (Pelintas Batas Tradisional)
.4	Pendaftaran Pengungsi Dan Penduduk Rentan
.41	Akibat Bencana Alam
.42	Akibat Kerusakan Sosial
.43	Pendaftaran Penduduk Daerah Terbelakang
.44	Pendaftaran Penduduk Rentan
472	Pencatatan Sipil
.1	Kelahiran, Kematian, Dan Advokasi
.11	Kelahiran
.12	Kematian
.13	Advokasi Kelahiran Dan Kematian
.2	Perkawinan, Perceraian, Dan Advokasi
.21	Perkawinan Agama Islam
.22	Perkawinan Agama Non Islam
.23	Perceraian Agama Islam
.24	Perceraian Agama Non Islam
.25	Advokasi Perkawinan Dan Perceraian
.3	Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan Akta Dan Advokasi
Pengangkatan Anak	
.31	Pengangkatan Anak
.32	Pengakuan Anak
.33	Pengesahan Anak
.34	Perubahan Anak
.35	Pembatalan Anak
.36	Advokasi Pengurusan Pengangkatan, Pengakuan, Dan Pengesahan Anak Serta Perubahan Dan Pembatalan
Akta	
.4	Pencatatan Kewarganegaraan Anak
.41	Akibat Perkawinan
.42	Akibat Kelahiran
.43	Non Perkawinan
.44	Non Kelahiran
.45	Perubahan WNI Ke WNA
473	Informasi Kependudukan
.1	Teknologi Informasi
.11	Perangkat Keras
.12	Perangkat Lunak
.13	Jaringan Komunikasi Data
.2	Kelembagaan Dan Sumber Daya Informasi
.21	Daerah Maju
.22	Daerah Berkembang
.23	Daerah Terbelakang
.3	Pengolahan Data Kependudukan
.31	Pendaftaran Penduduk
.32	Kejadian vital
.33	Penduduk non registrasi
.4	Pelayanan informasi kependudukan
.41	Media elektronik
.42	Media cetak
.43	Outlet

474	Perkembangan Penduduk
.1	Pengarahan Kuantitas Penduduk
.11	Struktur Jumlah
.12	Komposisi
.13	Fertilitas
.14	Kesehatan Reproduksi
.15	Mortalitas Penduduk
.16	Mortalitas Penduduk
.2	Pengembangan Kuantitas Penduduk
.21	Anak Dan Remaja
.22	Penduduk Usia Produktif
.23	Penduduk Lanjut Usia
.24	Gender
.3	Penataan Persebaran Penduduk
.31	Migrasi Antar Wilayah
.32	Migrasi Internasional
.33	Urbanisasi
.34	Sementara
.35	Migrasi Non Permanen
.4	Perlindungan Pemberdayaan Penduduk
.41	Pengembangan Sistem Perlindungan Penduduk
.42	Pelayanan Kelembagaan Ekonomi
.43	Pelayanan Kelembagaan Sosial Budaya
.44	Partisipasi Masyarakat
.5	Pengembangan Wawasan Kependudukan
.51	Pendidikan Jalur Sekolah
.52	Pendidikan Jalur Luar Sekolah
.53	Pendidikan Jalur Masyarakat
.54	Pembangunan Berwawasan Kependudukan
475	Proyeksi Dan Penyerasian Kebijakan Kependudukan
.1	Indikator Kependudukan
.11	Perumusan Penetapan Dan Pengembangan
Indikator	
	Kependudukan
.12	Pemanfaatan Indikator Kependudukan
.13	Sosialisasi Indikator Kependudukan
.2	Proyeksi Kependudukan
.21	Penyusunan dan pengembangan proyeksi
	kependudukan
.22	Pemanfaatan proyeksi kependudukan
.3	Analisis dampak kependudukan
.31	Penyusunan dan pengembangan
.32	Pemanfaatan analisis dampak kependudukan
.4	Penyerasian kebijakan lembaga non pemerintah
.41	Lembaga internasional
.42	Lembaga masyarakat dan nirlaba
.43	Lembaga usaha swasta
.5	Penyerasian kebijakan lembaga pemerintah
.51	Lembaga pemerintah
.52	Pemerintah provinsi
.53	Pemerintah kabupaten/kota
.6	Analisis
476	Monitoring
477	Evaluasi
478	Dokumentasi

479	-	
480	Media Massa	
481	Penerbitan	
	.1	Surat Kabar
	.2	Majalah
	.3	Buku
	.4	Penerjemahan
	.5	Press
	.6	Kliping koran
482	Radio	
	.1	RRI
	.2	Non RRI
	.3	Luar Negeri
	.4	Swasta
	.5	Komunitas
483	Televisi	
	.1	TVRI
	.2	Televisi swasta
	.3	Televisi asing
	.4	Televisi lokal
484	Film	
485	Pers	
	.1	Kewartawanan
	.2	Wawancara
	.3	Informasi Nasional
486	Grafika	
487	Penerangan	
	.1	Pameran Non Komersil
488	Press/Operation Room	
489	Hubungan Masyarakat	
490	Pengaduan Masyarakat	
491	Surat pembaca	
492		
493		
494		
495		
496		
497		
498		
499		

500 PEREKONOMIAN

500	PEREKONOMIAN
	.1 Dewan Stabilasi
	.2 Komisi Ekonomi
501	Pengadaan Pangan
502	Pengadaan Sandang
503	Perijinan pada umumnya, Untuk perijinan suatu bidang klasifikasikan pada masalahnya
504	Ekonomi Makro
505	Ekonomi Mikro
506	Ekonomi Kerakyatan

- 507 -
- 508 -
- 509 -
- 510 PERDAGANGAN
 - Klasifikasikan disini ; Tataniaga
 - .1 Promosi Perdagangan
 - .11 Pekan Raya
 - .12 Iklan produk
 - .13 Pameran non komersil
 - .14 Perlombaan (Lomba Desain, Busana, Kerajinan)
 - .15 Pasar
 - .16 Pertokoan, Kios, PKL
 - .2 Pelelangan, distribusi
 - .21 Pemasaran sembako
 - .22 Pemasaran Hasil Industri
 - .23 Penentuan Harga Pokok
 - .3 Bina Usaha dan Sarana Perdagangan
 - .31 Rencana dan Program Kerja
 - .32 Pelaksanaan Pelayanan Administrasi
 - .33 Pelaksanaan Teknis
 - .34 Pemantauan
 - .35 Evaluasi dan Pelaporan
 - .4 Perijinan
 - .41 Penerbitan SIUP
 - .42 Perpanganan
 - .43 ijin Prinsip
 - .44 Rekomendasi
 - .5 Perdagangan Antar Pulau
 - .51 Kerjasama Bahan Baku
 - .52 Industri Pemasaran
 - .53 Kontrak
 - .6 Tera
 - .61 Tera Ulang Ukuran
 - .62 Takaran
 - .63 Timbangan
 - .64 Kalibrasi
 - .65 Cap Tanda Tera
 - .66 Biaya Tera
 - .7 Bantuan Peralatan
 - .71 Proposal
 - .72 Surat Perjanjian/Kontrak
 - .73 Serah Terima
 - .8 Perijinan/Rekomendasi tanda pabrik
 - .9 Kemetrologian
 - .91 Standar Tingkat Tiga
 - .92 Standar Kerja Satuan Ukuran
 - .93 Standar Metrologi
 - .931 Peralatan
 - .932 Laboratorium Metrologi
 - .933 Tanki Ukuran Mobil
 - .934 Meter Tanki
 - .935 Kwh Meter
 - .936 SPBU

- 511 Pemasaran
 - .1 Sembilan bahan pokok, tambahkan kode wilayah, beras, garam, minyak tanah minyak goreng, sabun dsb.
 - .2 Pasar
 - .3 Pertokoan, Kaki Lima, Kios
- 512 Ekspor
 - .1 Ekspor Hasil Industri
 - .2 Ijin Ekspor
 - .3 Pengembangan Pasar Luar Negeri
 - .4 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .41 Kebijakan
 - .42 Pemasaran
 - .5 Pemberitahuan Ekspor Barang
 - .6 Pengawasan Mutu Barang
 - .7 Eksportir Terdaftar
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan
- 513 Impor
 - .1 Ijin Impor
 - .11 Pemberian Ijin
 - .12 Pengendalian Ijin
 - .2 Standar Mutu Dagang Impor
 - .3 Manajemen Perdagangan Internasional
 - .4 Kegiatan Impor
 - .41 Pembinaan Impor
 - .42 Pengendalian Impor
 - .43 Pemantauan Impor
 - .5 Faktor-Faktor Pendukung
 - .6 Pengawasan Mutu Barang Impor
 - .7 Penyaluran Kegiatan Impor
 - .71 Bahan konsumsi
 - .72 Bahan baku
 - .73 Bahan Penolong
 - .8 Evaluasi dan Pelaporan kegiatan Impor
- 514 Perdagangan Antar pulau
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Kerjasama bahan baku
 - .3 Industri Pemasaran
 - .4 Kontrak
- 515 Perdagangan Luar Negeri
 - .1 Pengembangan Potensi Luar Negeri
 - .11 Promosi dan Informasi
 - .12 Pameran
 - .13 Kerjasama
- 516 Pergudangan
 - .1 Peti Kemas
 - .2 Tangki Penyimpanan
- 517 Aneka Usaha Perdagangan
- 518 Koperasi
(Untuk BUUD,KUD Lihat Klasf.147.231-147.232)
- 519 Metrologi
- 520 PERTANIAN
- 521 Tanaman Pangan
 - .1 Program
 - .11 Bimas/Inmas termasuk kredit
 - .12 Penyuluhan
 - .2 Produksi

- .21 Padi/Panen
- .22 Palawija
- .23 Jagung
- .24 Ketela pohon
- .25 Holtikulura
- .26 Sayuran/Buah-buahan
- .27 Tanaman hias
- .3 Sarana Usaha Pertanian
- .31 Peralatan, meliputi Traktor Dan peralatan lainnya
- .32 Bantuan peralatan
- .33 Pembibitan
- .34 Pupuk
- .4 Perlindungan Tanaman
- .41 Penyakit daun, batang
- .42 Pemberantasan hama, meliputi : penyemprotan, penyiangan
- .43 Gropyokan, sparayer, pemberantasan melalui udara
- .44 Pestisida
- .5 Tanah Pertanian Pangan
- .51 Pesawahan
- .52 Perladangan
- .53 Kebun
- .54 KTA/Lahan Kritis
- .6 Pengusaha Petani
- .7 Bina Usaha
- .71 Pasca Panen
- .72 Pemasaran hasil
- 522 Kehutanan
 - .1 Program
 - .11 Hak Pengusaha Hutan
 - .12 Tata Guna Hutan
 - .13 Perpetaan Hutan
 - .14 Tumpang Sari
 - .2 Produksi
 - .21 Kayu
 - .22 Non Kayu
 - .3 Sarana usaha kehutanan
 - .4 Penghijauan, Reboisasi
 - .5 Kelestarian
 - .51 Cagar Alam, Marga Satwa, Suaka Marga Satwa
 - .52 Berburu, meliputi : Larangan dan ijin berburu
 - .53 Kebun Binatang
 - .54 Konservasi Lahan
 - .55 Kawasan Lindung
 - .6 Penyakit/Hama
 - .7 Jenis-jenis hutan
 - .71 Hutan Hidup
 - .72 Hutan Wisata
 - .73 Hutan Produksi
 - .74 Hutan Lindung
 - .75 Hutan Rakyat
- 523 Perikanan dan Kelautan
 - .1 Program
 - .11 Penyuluhan
 - .12 Teknologi
 - .2 Produksi
 - .21 Pelelangan

- .3 Usaha Perikanan
- .31 Pembibitan
- .32 Daerah penangkapan
- .33 Pertambakan meliputi : Tambak ikan, tambak udang, dll.
- .34 Jaring terapung
- .4 Sarana
- .41 Peralatan
- .42 Kapal
- .43 Pelabuhan
- .5 Pengusaha
- .6 Nelayan
- .7 Data Perikanan
- .8 Nelayan
- .81 Perkampungan Nelayan
- .82 Pelanggaran Kapal
- .9 Pelestarian Ikan
- 524 Peternakan
 - .1 Produksi
 - .11 Susu Ternak rakyat
 - .12 Telur
 - .13 Daging
 - .14 Kulit
 - .2 Sarana Usaha ternak
 - .21 Pembibitan
 - .22 Kandang ternak
 - .3 Kesehatan Hewan
 - .31 Penyakit Hewan
 - .32 Pos Kesehatan Hewan
 - .33 Tesi Pollorum
 - .34 Karantina
 - .35 Pemberantasan penyakit hewan termasuk usaha pencegahannya
 - .4 Perunggasan
 - .41 Ayam Ras
 - .42 Ayam Buras
 - .43 Itik
 - .44 Burung
 - .5 Pengembangan Ternak
 - .51 Insemibasi Buatan
 - .52 Pembibitan/Bibit Unggul
 - .53 Penyebaran Ternak
 - .6 Makanan Ternak
 - .7 Tempat Pematangan Hewan
 - .8 Data Peternakan
- 525 Perkebunan
 - .1 Program
 - .2 Produksi
 - .21 Karet
 - .22 Teh
 - .23 Tembakau
 - .24 Tebu
 - .25 Cengkeh
 - .26 Kopra
 - .27 Kopi
 - .28 Coklat
 - .29 Aneka Tanaman

- .3 Pembibitan
- .31 Gulma
- .4 Hama/Penyakit
- .41 Badra
- .5 Pengolahan Lahan
- .51 Terasering
- 526 Ketahanan Pangan
 - .1 Program Bimbingan Masal
 - .2 Pengembangan Sarana Sumber Daya
 - .21 Pembinaan Teknologi
 - .22 Sarana Produksi dan Permodalan
 - .23 kelembagaan
 - .3 Agribisnis
 - .31 Mutu Hasil
 - .32 Pengolahan Hasil Pangan
 - .33 Kemitraan
 - .4 Distribusi Pangan
 - .41 Sistem Dan Pola Distribusi
 - .42 Sarana Dan Prasarana Distribusi
 - .43 Pengadaan dan Cadangan Pangan
 - .5 Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan
 - .51 Rawan Pangan, Keamanan dan Mutu Pangan
 - .52 Pola Konsumsi Pangan Masyarakat
 - .53 Sistem Informasi Pangan
- 527 Pengembangan Ketahanan Pangan
 - .1 Kelembagaan dan Infrastruktur Pangan
 - .2 Distribusi Harga Pangan
 - .3 Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - .4 Konsumsi dan Keamanan Pangan
- 528 -
- 529 -
- 530 PERINDUSTRIAN
- 531 Industri Logam
- 532 Industri Mesin/Elektronik
- 533 Industri Kimia/Farmasi
- 534 Industri Tekstil
- 535 Industri Makanan dan minuman
- 536 Aneka Industri/Perusahaan
 - .1 Home Industri
- 537 Aneka Kerajinan
 - .1 Kerajinan Rakyat
- 538 Usaha Negara / BUMN
 - .1 Perjan
 - .2 Perum
 - .3 Persero/CV/PT
- 539 Perusahaan Daerah/BUMD/BULD
- 540 PERTAMBANGAN/KESAMUDERAAN
- 541 Minyak bumi
 - .1 Pengusahaan/eksplorasi
- 542 Gas bumi
 - .1 Eksploitasi/pengeboran
 - .11 Kontrak kerja
 - .2 Pengolahan, meliputi : tangki, pompa, tanker, tarakhit, tanah liat dan pasir

- 543 Aneka tambang
 - .1 Timah
 - .2 Alumunium, boxit
 - .3 Besi
 - .4 Tembaga
 - .5 Batubara
- 544 Logam Mulia : Emas, Intan, Perak
- 545 Logam
- 546 Geologi
 - .1 Vulkanologi
 - .11 Pengawas Gunung Berapi
 - .2 Sumur artetis
- 547 Hidrologi
- 548 Kesamuderaan
- 549 Pesisir pantai/Kelautan
- 550 PERHUBUNGAN
- 551 Perhubungan Darat
 - .1 Lalu lintas jalan raya, sungai, danau
 - .11 Keamanan lalu lintas, rambu-rambu
 - .12 Uji kelayakan kendaraan bermotor (Kir)
 - .2 Angkutan Jalan Raya
 - .21 Perijinan
 - .22 Terminal
 - .23 Alat Angkut
 - .24 Jembatan timbang/lebih muatan
 - .3 Angkutan Sungai
 - .31 Perijinan
 - .32 Terminal
 - .33 Pelabuhan
 - .34 Keselamatan, rambu-rambu
 - .35 Lalu lintas
 - .36 Alur dan Kolam pelabuhan
 - .37 Trayek
 - .38 Sarana/Kapal
 - .39 Kecelakaan
 - .4 Angkautan Danau
 - .41 Perijinan
 - .42 Terminal
 - .43 Pelabuhan
 - .44 Keselamatan, rambu-rambu
 - .45 Lalulintas
 - .46 Alur dan Kolam pelabuhan
 - .47 Trayek
 - .48 Sarana/kapal
 - .49 Kecelakaan
 - .5 Feri
 - .51 Perijinan
 - .52 Terminal
 - .53 Pelabuhan
 - .54 Sarana dan prasarana kapal
 - .57 Trayek
 - .58 Sarana/kapal
 - .59 Kecelakaan
 - .6 Perkeretaapian
 - .61 Sarana (Lokomotif, Gerbong, Bogie)
 - .62 Signal

.63	Trayek
.64	Angkutan penumpang
.65	Angkutan barang
.66	Keselamatan
.67	Kecelakaan
.68	Perawatan/perbaikan
.69	Perijinan
552	Perhubungan Laut
.1	Lalu lintas angkutan laut
.11	Keamanan lalu lintas, rambu-rambu, mercusuar
.12	Pelayaran luar negeri
.13	Pelayaran dalam negeri
.2	Perkapalan alat angkutan
.21	Kapal Penumpang
.22	Kapal Barang
.23	Kapal Perang/Patroli/Negara
.24	Kapal Tanker
.25	Ponton/Tonkang
.26	Kapal Layar
.27	Kapal Layar Motor
.28	Kapal Kontainer
.3	Pelabuhan
.31	Tanah/Lokasi
.32	Alur Layar
.33	Dermaga
.34	Terminal Penumpang
.35	Terminal Kontainer
.36	Bangunan/Gedung/Gedung
.37	Perlengkapan tambat labuh
.38	Lapangan
.39	Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus
.4	Pengerukan
.41	Alur Pelayarana
.42	Kolam Pelabuhan
.43	Reklamasi Pantai
.45	Pekerjaan Bawah Air (Soluage)
.5	Penjagaan Pantai
.51	Patroli Bandar
.52	Patroli Perairan
553	Perhubungan Udara
.1	Angkutan Udara/Keamanan lalulintas udara
.2	Pelabuhan udara
.3	Alat angkutan
554	Pos
555	Telekomunikasi
.1	Telepon
.2	Telegram
.3	Telex/SSB
.4	Faximile
.5	Satelit
.6	Stasiun Bumi, Parabola
.7	Wartel
556	Pariwisata dan Rekreasi
.1	Izin Usaha Kepariwisataaan
.11	Izin Usaha Sarana Wisata
.12	Izin Usaha Objek dan Atraksi Wisata

.2	Wisatawan
.21	Wisatawan Mancanegara
.22	Wisatawan Nusantara
.3	Obyek Wisata dan Atraksi
.31	Obyek Wisata
Meliputi : Wisata Tirta, Situ, dan Marina Alam, Wisata Remaja dan Sosial, Wisata KONvesi, Budaya dan Religius.	
.32	Atraksi
.321	Hiburan Umum
.4	Promosi Kepariwisataaan
.41	Sadar Wisata
.42	Mandala Wisata
.43	Tourism Information Centre
.44	Pameran Pariwisata meliputi ; Pekan Pariwisata dan Pata
.45	Taman Mini Indonesia Indah
.46	Bimas Pariwisata
.5	Perjalanan Wisata
.51	Biro Perjalanan
.52	Angkutan Wisata
.6	Pramuwisata
	Meliputi : Pramuwisata Madya, Parmuwisata Muda, Pramuwisata Khusus
.7	Fasilitas Wisatawan
.71	Hotel/Motel
.72	Losmen/Penginapan
.73	Penginapan Remaja
.74	Pondok Wisata
.75	Perkemahan
.76	Restoran, Bar dan Diskotik
.77	Rumah Makan
557	Meteorologi
.1	Ramalan Cuaca
.11	Curah Hujan
.12	Kemarau
558	-
559	-
560	TENAGA KERJA
.1	Pengangguran
.2	Job Order TKI Ke Luar Negeri Oleh PJTKI
.3	Rekrutmen Calon TKI/TKW
.4	Seleksi Tenaga Kerja Ke Luar Negeri
.41	Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW
.42	Berkas Persyaratan dan Hasil Cek Kesehatan
.43	Perlindungan Tenaga Kerja Pelayanan
.44	Perlindungan TKI/TKW
.5	Persyaratan TKI/TKW
.51	Permohonan Rekomendasi Pasport
.52	Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu
.53	Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI)
.54	Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri
.55	Pelatihan TKI/TKW
.56	Perjanjian Kerja TKI dengan Pengguna
.57	Kurikulum Pelatihan TKLN
.58	Kualifikasi dan Kompetensi Instruktur TKLN
.59	Uji Kompetensi CTKI oleh LSP dan BNSP

- .6 Pemberangkatan Tenaga Kerja
- .61 Pemberangkatan Ke Luar Negeri
- .62 Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW ke Luar Negeri.
- .63 Berita Acara Serah Terima TKI/TKW
- .7 Pemulangan Tenaga Kerja
- .71 Kepulangan TKI/TKW Karena Kontraknya Habis
- .72 Pemulangan TKI/TKW Ilegal
- .73 TKI/TKW
- .74 Pelayanan CTKI (Calon Tenaga Kerja Indonesia)
- .75 Data dan Informasi Penempatan TKI
- .76 Monitoring TKI
- .77 TKI Bermasalah
- .78 Bimbingan Pasca TKI
- 561 Upah
 - .1 Kegiatan dan Hasil Sidang Dewan Penelitian Pengupahan Daerah/Nasional.
 - .2 Permohonan Penangguhan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/Kota dan Provinsi
 - .3 Kebutuhan Fisik Minimum
 - .4 Perhitungan Upah Kerja (Termasuk di dalamnya upah lembur)
 - .5 Laporan Data Remittance
 - .6 Pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW
 - .7 Upah Minimum Kabupaten/Kota
- 562 Penempatan Tenaga Kerja
 - .1 Penempatan Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga Kerja mandiri (TKMT)
 - .11 Penempatan Tenaga Kerja mandiri Profesional (TKMP)
 - .12 Penempatan Tenaga Kerja Non Terdidik dan Non Profesional, Pengembangan Kesempatan berusaha /Perluasan Kerja
 - .2 Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
 - .3 Lembaga Penyalur Tenaga Kerja
 - .31 Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Jasa Tenaga Kerja Lokal/Daerah antar Kerja Negara
 - .32 Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK)
 - .33 Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BBK)
 - .4 Informasi Pasar Kerja
 - .41 Bursa Pasar Kerja
 - .5 Ijin Tenaga Kerja Warga Negara Asing Pendetang
 - .51 Antar Kerja Lokal
 - .52 Antar Kerja Antar Daerah
 - .53 Antar Kerja Antar Negara
 - .54 Tenaga Kerja Antar Kerja Khusus (Wanita, Pemuda, Lansia dan Penayandang Cacat)
- 563 Latihan Kerja
 - .1 Pendidikan Kerja
 - .11 Pendidikan dan Latihan Kerja
 - .12 Diklat di Dalam Negeri (PKL,Prakerim,OJT)
 - .13 Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan)

	.2	Sarana dan Prasarana Latihan Kerja
	.21	Tempat Pelatihan (BLK)
	.2	Instruktur/Pelatih
	.23	Modul /Silabus dan Bahan Praktek
	.24	Kurikulum
	.25	Sertifikat
	.3	Kerjasama Pelatihan Kerja
	.4	Produktivitas Tenaga Kerja
	.5	Pemagangan Tenaga Kerja
	.51	Diklat Pemagangan
	.6	Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi
564		Tenaga kerja Sukarela
	.1	Butsi
	.2	Padat Kerja
565		Perselisihan Perburuhan
	.1	Perselisihan dan Perkara Hukum Tenaga Kerja
	.11	Pengaduan Perkara Perburuhan
	.12	Pemeriksaan Perkara
	.13	Penyelidikan
	.14	Sidang Perkara Perselisihan Buruh
	.15	Hasil Putusan Sidang Perkara perselisihan Buruh
	.16	Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K
	.17	Permintaan Eksekusi Terhadap Hasil Putusan KP2K
	.18	Daftar Usulan, Susulan dan penetapan Anggota KP2K
	.2	Pemogokan/Unjuk Rasa Tenaga Kerja
566		Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	.1	Instalasi Proteksi Kebakaran
	.2	Pemakaian Alat Keselamatan Kerja
	.3	Keterangan Kelayakan Atau Pelindung Diri (APD) dalam Kerja
	.4	Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
	.5	Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja
	.6	Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes
	.7	Gangguan Lingkungan Tempat Usaha (Misal : suara bising, Limbah dll)
	.8	Perlengkapan Sarana Kerja
	.81	Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat Angkat/Angkut)
	.82	Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (Katel Uap)
	.83	Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel
	.84	Pemasangan dan Pemakaian Tanki tak Bertekanan
	.85	Pemasangan dan Pemakaian alat Pemadam Kebakaran
	.9	Ijin Tenaga Kerja Wanita masuk malam Hari (Sift Malam)
567		Pemutusan Hubungan Kerja
	.1	Pengaduan PHK Sepihak
	.2	PHK Masal
	.3	Bantuan Hukum Bagi Pekerja Yang Di PHK
	.4	Ijin Melakukan PHK
	.5	Perhitungan masa Kerja Bagi Pekerja yang Di PHK

	.6	Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang Di PHK
	.7	Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK
568		Kesejahteraan Pekerja/Buruh
	.1	Bantuan Kredit/Bantuan Modal Kerja Bagi Tenaga Kerja
	.11	Pemilihan Pekerja Teladan
	.2	Perumahan Pekerja
	.3	Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek
	.4	Koperasi Pekerja
	.5	Perpustakaan Pekerja
	.7	Tempat Ibadah Pekerja
	.8	Rekreasi dan Olahraga Pekerja
	.9	Lembaga Kerjasama Bipartit
569		Tenaga Kerja Orang Asing
	.1	Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Tenaga Kerja (IKTA)
	.2	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
	.3	Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing
	.4	Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing
	.5	Data Tenaga Kerja Asing
	.6	Kecelakaan/Kematian Tenaga Kerja Asing, Perselisihan dan Pengaduan tenaga Kerja Asing.
	.7	Pemulangan Tenaga Kerja Asing
	.8	Pemberdayaan dan Kontribusi Tenaga Kerja Asing
	.9	Tenaga Kerja Asing Ilegal
570		PERMODALAN
571		Modal Domestik
572		Modal Asing
	.1	Kerja sama Penanaman Modal Antar Provinsi
	.2	Kerja sama Penanaman Modal Antar Kabupaten/Kota
573		Modal Patungan (Joint venture)/Penyertaan modal
574		Pasar Uang dan Modal
575		Saham
576		Belanja Modal
577		Modal Daerah
578		Bursa Efek
579		Obligasi
580		PERBANKAN/MONETER
581		Kredit
582		Investasi
583		Tabungan ; Pembukaan, penutupan rekening, deposito
	.1	Deposito
	.2	Tabanas
	.3	Rekening
	.4	hadiah Tabungan
584		Bank Pembangunan Daerah/Lembaga Perbankan
	.1	Bank Pemerintah
	.2	Lembaga perbankan daerah
	.21	Lembaga Keuangan Kecamatan
	.22	BPR
	.3	Bank Swasta
	.4	Bank Syariah
585		Asuransi dana kecelakaan dan lalulintas
	.1	Polis
	.2	Premi
	.3	Tertanggung/Pemegang Polis
	.4	Uang Pertanggungan

586	Alat Pembayaran, cek, giro, wesel, transfer
587	Fiskal
588	Hutang Negara
589	Moneter
590	AGRARIA
591	Tataguna Tanah
.1	Pemetaan Dan Pengukuran
.2	Perpetaan
.3	Penyediaan Data, Peta dan Publikasi
.4	Fatwa Tataguna Tanah
.5	Tanah kritis
592	Landeform
.1	Redistribusi
.11	Pendaftaran Pemilikan dan Pengurusan Tanah Pertanian.
.12	Penentuan Tanah Obyek Landreform
.13	Pembagian Tanah Obyek Landreform
.14	Sengketa Redistribusi tanah Obyek Landreform
.2	Ganti Rugi
.21	Ganti Rugi Tanah Kelebihan
.211	Sengketa Ganti Rugi Tanah Kelebihan
.22	Ganti Rugi Tanah Absentee
.23	Ganti Rugi Tanah Partikelir
.3	Bagi Hasil
.31	Penetapan Imbangan Bagi Hasil
.32	Pelaksanaan Perjanjian Bagi Hasil
.33	Sengketa Perjanjian Bagi Hasil
.4	Gadai Tanah
.41	Pendaftaran Pelaksanaan Gadai Tanah
.42	Pelaksanaan Gadai Tanah
.43	Sengketa Gadai Tanah
.5	Bimbingan dan Penyuluhan
.6	Pengembangan
.7	Yayasan Dana Lanreform (YDL)
593	Pengurusan Hak-hak Tanah
.1	Sewa Tanah
.11	Sewa Tanah Untuk Tanaman Tertentu : Tebu, Tembakau, Rosela, Corchrus.
.2	Hak Milik
.21	Perorangan
.22	Badan Hukum
.3	Hak Pakai
.31	Perorangan
.311	Warga Negara Indonesia
.312	Warga Negara Asing
.32	Badan Hukum
.321	Badan Hukum Indonesia
.322	Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing
.33	Tanah Gedung-Gedung Negeri
.4	Guna Usaha
.41	Perkebunan Besar
.42	Perkebunan Rakyat
.43	Pternakan
.44	Perikanan
.45	Kehutanan

.5	Hak Guna Bangunan
.51	Perorangan
.52	Badan Hukum
.6	Hak Pengelolaan
.61	PN Perumnas, Bonded Ware House, Industrial Estate, Real Estate)
.62	Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan
.7	Sengketa
.71	Peradilan Perkara Tanah (Lihat Juga 183)
.8	Pencabutan dan Pembebasan Tanah
.81	Pencabutan Hak
.82	Pembebasan Tanah
.83	Ganti Rugi Tanah
594	Pendaftaran Tanah
.1	Pengukuran/Pemetaan
.11	Fotogrametri
.12	Teristris
.13	Triangulasi
.14	Peralatan
.2	Dana Pengukuran
.3	Sertifikat
.4	Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
595	Tanah Untuk Transmigrasi
.1	Tata Guna Tanah
.2	Landerform
.3	Pengurusan hak-hak Tanah
.4	Pendaftaran Tanah
596	-
597	-
598	-
599	-

600

PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN

600	PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN
601	Tata Bangunan, Konstruksi, Industri Konstruksi
602	Kontraktor pemborong
.1	Tender
.2	Penunjukan
.3	Prakualifikasi
.31	Daftar Rekanan Mampu
.32	Tanda Daftar Rekanan
603	Arsitektur
604	Bahan Bangunan
.1	Tanah dan Batu (seperti : Batu Belah, Steen Slag, Solit, Pasir, Koral, lempung, Kapur, Marmer).
.2	Aspal
.3	Besi dan Logam Lainnya
.31	Besi Beton
.32	Besi Profil (Konstruksi)
.33	Baja
.34	Paku
.35	Aluminium Profil

.4	Bahan-bahan Pelindung dan Pengawet (Cat, Pengawet Kayu)
.5	Semen
.6	Kayu Seperti : Balok, Papan, Dolken,Plywood, Gabus dsb)
.7	Bahan Penutup Atap (Genteng, Asbes Gelombang, Seng, dsb)
.8	Alat-Alat Penggantung dan Pengunci
.9	Bahan-bahan Bangunan Lainnya
605	Instalasi
.1	Instalasi Bangunan
.2	Instalasi Listrik
.3	Instalasi Air/Sanitasi
.4	Instalasi Pengatur Udara
.5	Instalasi Akustik
.6	Instalasi Cahaya/Penerangan
606	Konstruksi Pencegahan
.1	Konstruksi Pencegahan Terhadap Kebakaran
.2	Terhadap Gempa
.3	Terhadap Angin/Udara/Panas
.4	Terhadap Kegaduhan
.5	Terhadap Gas/Eksplosive
.6	Terhadap Serangga
.7	Terhadap Radiasi Atom
607	-
608	-
609	-
610	PENGAIRAN
611	Irigasi
.1	Bangunan Waduk
.11	Bendungan
.12	Tanggul
.13	Pelimpahan Banjir
.14	Menara Pengambilan
.2	Bangunan Pengambilan
.21	Bendungan
.22	Bendungan Dengan Pintu Bilas
.23	Bendungan Dengan Pompa
.24	Pengambilan Bebas
.25	Pengambilan Bebas Dengan Pompa
.26	Sumur Dengan Pompa
.27	Kantung Lumpur
.28	Slit Ekstraktor
.29	Escope Chanel
.3	Bangunan Pembawa
.31	Saluran
.311	Saluran Induk
.312	Saluran Sekunder
.313	Susplesi
.314	Tersier
.315	Saluran Kwarter
.316	Saluran Pasangan
.317	Saluran Tertutup/Terowongan
.32	Bangunan
.321	Bangunan Bagi
.322	Bangunan Bagi dan Sadap
.323	Bangunan Sadap

.324		Bangunan Check
.325		Bangunan Terjun
.33		Box Tersier
.34		Got Miring
.35		Talang
.36		Syphon
.37		Gorong-Goron
.38		Pelimpahan Samping
.4	Bangunan Pembuang	
.41		Saluran
.411		Saluran Pembuang Induk
.412		Saluran Pembuang Sekunder
.413		Saluran Pembuang Tersier
.42	Bangunan	
.421		Bangunan Out Let
.422		Bangunan Terjun
.423		Bangunan Penahan Banjir
.43		Gorong-Gorong Pembuang
.44		Talang Pembuang
.45		Syphon Pembuang
.5	Bangunan Lainnya	
.51		Jalan
.511		Jalan Inspeksi
.512		Jalan Logistik
.52	Jembatan	
.521		Jembatan Inspeksi
.522		Jembatan Hewan
.53		Tangga Cuci
.54		Kubangan Kerbau
.55		Waduk Lapangan
.56		Bangunan Penunjang
.57		Jaringan Telepon
.58		Stasiun Agro
612	Folder	
.1		Tanggul Keliling
.11		Tanggul
.12		Bangunan Penutup Sungai
.13		Jembatan
.2	Bangunan Pembawa	
.21		Saluran
.211		Saluran Muka
.212		Saluran Pembawa Induk
.213		Saluran Sekunder
.22		Stasiun Pompa Pemasukan
.23		Bangunan Bagi
.24		Gorong-Gorong
.25		Syphon
.3	Bangunan Pembuang	
.31		Stasiun Pompa Pembuangan
.32		Saluran
.321		Saluran Pembuangan Induk
.322		Saluran Pembuangan Sekunder
.33		Pintu Air Pembuangan
.34		Gorong-Gorong Pembuangan
.35		Syphon Pembuangan

- .4 Bangunan Lainnya
- .41 Bangunan
 - .411 Bangunan Pengukur Air
 - .412 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .413 Bangunan Gudang Stasiun Pompa
 - .414 Bangunan Listrik Stasiun Pompa
- .42 Rumah Petugas Eksploitasi
- 613 Pasang Surut
 - .1 Bangunan Pembawa
 - .11 Saluran
 - .111 Saluran Pembawa Induk
 - .112 Saluran Pembawa Sekunder
 - .113 Saluran Pembawa Tersier
 - .114 Saluran Penyimpan Air
 - .115 Bangunan Pintu Pemasukan
 - .2 Bangunan Pembuangan
 - .21 Saluran
 - .211 Saluran Pembuangan Induk
 - .212 Saluran Pembuangan Sekunder
 - .213 Saluran Pembuangan Tersier
 - .214 Saluran Pengumpul Air/Penyimpan Air
 - .22 Bangunan Pintu Pembuangan
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Kolam Lainnya/Pasang
 - .32 Saluran
 - .321 Saluran Lalu Lintas
 - .322 Saluran Muka
 - .33 Bangunan
 - .331 Bangunan Penangkis Kotoran
 - .332 Bangunan Pengukur Muka Air
 - .333 Bangunan Pengukur Curah Hujan
 - .34 Jalan
 - .35 Jembatan
- 614 Pengendalian Sungai
 - .1 Bangunan Pengamanan
 - .11 Tanggul Banjir
 - .12 Pintu Pengatur Banjir
 - .13 Klep Pengatur Banjir
 - .14 Tembok Pengaman Talud
 - .15 Krib
 - .16 Kantong Lumpur
 - .17 Chek Dam
 - .18 Syphon
 - .2 Saluran Pengaman
 - .21 Saluran Banjir
 - .22 Saluran Drainage
 - .23 Courpore
 - .3 Bangunan Lainnya
 - .31 Warning Sistem
 - .32 Stasiun
 - .321 Stasiun Pengukur Hujan
 - .322 Stasiun Pengukur Hujan
 - .323 Stasiun Pengukur Cuaca
 - .324 Stasiun Pos Penjagaan

615	Pengaman Pantai
.1	Tanggul
.2	Krib
.3	Bangunan Lainnya
616	Air Tanah
.1	Stasiun Pompa
.2	Bangunan Pembawa
.3	Bangunan Pembuang
.4	Bangunan Lainnya
617	-
618	-
619	-
620	JALAN
621	Jalan Kota
.1	Daerah Penguasa
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.32	Stabilitas
.4	Perkerasan (Pavemen)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit Tanah
.52	Gorong-Gorong
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median/Medium
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.82	Pagar
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-rambu/Tanda-tanda lalu Lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.94	Patok-patok KM
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar

.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
622	Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Badan Jalan
.31	Pekerjaan Tanah
.32	Stabilisasi
.4	Perkerasan (Pavement)
.41	Lapisan Pondasi Bawah
.42	Lapis Pondasi
.43	Lapis Permukaan
.5	Drainage
.51	Parit
.52	Gorong-Gorong (Culvert)
.53	Sub Drainage
.6	Buku Trotoir
.61	Tanah
.62	Perkerasan
.63	Pasangan
.7	Median
.71	Tanah
.72	Tanaman
.73	Perkerasan
.74	Pasangan
.8	Daerah Samping
.81	Tanaman
.9	Bangunan Pelengkap dan Pengamanan
.91	Rambu-Rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.92	Lampu Penerangan
.93	Lampu Pengatur lalu Lintas
.94	Patok-Patok KM
.95	Patok-Patok ROW (Sempadan)
.96	Rel Pengaman
.97	Pagar
.98	Turap Penahan
.99	Bronjong
623	Pengaspalan
624	Pembetonan
625	Hotmix
626	-
627	-
628	-
629	-
630	JEMBATAN
631	Jembatan pada Jalan Kota

.1	Daerah penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan
.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah (Earth Work)
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengamanan
.71	Turap/ Penahan
.72	Brojong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Corpure
.76	Krib
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-Rambu/ Tanda-tanda Lalu Lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengaturan Lalu Lintas
.84	Patok Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit (Oprit)
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Baku
.95	Median
632	Jembatan Pada Jalan Luar Kota
.1	Daerah Penguasaan
.11	Tanah
.12	Tanaman
.13	Bangunan

.2	Bangunan Sementara
.21	Jalan Sementara
.22	Jembatan Sementara
.23	Kantor Proyek
.24	Gudang Proyek
.25	Barak Kerja
.26	Laboratorium Lapangan
.27	Rumah
.3	Pekerjaan Tanah
.31	Galian Tanah
.32	Timbunan Tanah
.4	Pondasi
.41	Pondasi Kepala Jembatan
.42	Pondasi Pilar
.43	Pondasi Angker
.5	Bangunan Bawah
.51	Kepala Jembatan
.52	Pilar
.53	Piloon
.54	Landasan
.6	Bangunan Atas
.61	Gelagar
.62	Lantai
.63	Perkerasan
.64	Jalan Orang (Trotoir)
.65	Sandaran
.66	Talang Air
.7	Bangunan Pengaman
.71	Turap/Penahan
.72	Brojong
.73	Strek Dam
.74	Kiset Dam
.75	Courpore
.76	Krib (Kriup)
.8	Bangunan Pelengkap
.81	Rambu-rambu/Tanda-tanda Lalu lintas
.82	Lampu Penerangan
.83	Lampu Pengatur Lalu Lintas
.84	Patokan Pengaman
.85	Patok ROW (Sempadan)
.86	Pagar
.9	Sprit/Oprit
.91	Badan
.92	Perkerasan
.93	Drainage
.94	Bahu
.95	Median
633	-
634	-
635	-
637	-
638	-
639	-
640	BANGUNAN

- 641 Bangunan Pemerintah
 - .1 Gedung Pengadilan
 - .2 Rumah Pejabat Negara
 - .3 Gedung DPRD
 - .4 Gedung Balai Kota
 - .5 Penjara
 - .6 Perkantoran
 - .7 Gedung Lainnya
- 642 Bangunan Pendidikan
 - .1 Taman Kanak-kanak
 - .2 SD dan Sekolah Menengah
 - .3 Perguruan Tinggi
- 643 Bangunan Rekreasi
 - .1 Bangunan Olah Raga
 - .2 Gedung Kesenian
 - .3 Gedung pemancar
 - .4 Gedung Lainnya
- 644 Bangunan Perdagangan
 - .1 Pusat Perbelanjaan
 - .2 Gedung Perdagangan
 - .3 Bank
 - .4 Perkantoran dll
- 645 Bangunan Pelayanan Umum
 - .1 Mandi, Cuci, kakus (MCK) Umum
 - .2 Gedung Parkir
 - .3 Rumah Sakit
 - .4 Gedung Telkom
 - .5 Terminal Angkutan Udara
 - .6 Terminal Angkutan Air
 - .7 Terminal Angkutan Darat
 - .8 Bangunan Keagamaan
 - .9 Bangunan Lainnya
- 646 Bangunan Peninggalan Sejarah
 - .1 Monumen
 - .2 Candi
 - .3 Keraton
 - .4 Rumah Tradisional
 - .5 Rumah Lainnya
- 647 Bangunan Industri
- 648 Bangunan Tempat Tinggal
 - .1 Rumah Perkotaan
 - .11 Inti/Sederhana
 - .12 Sedang/Mewah
 - .2 Rumah pedesaan
 - .21 Rumah Contoh
 - .3 Real Estate
 - .31 Rumah BTN
 - .32 Rumah Perumnas
- 649 Elemen Bangunan
 - .1 Pondasi
 - .11 Di Atas Tiang
 - .2 Dinding
 - .21 Penahan Beban
 - .22 Tidak Menahan Beban

.3	Atap
.31	Atap Genting
.32	Atap Asbes
.33	Atap Seng
.4	Lantai/Langit-langit
.41	Suspended
.42	Solit
.5	Pintu/Jendela
.51	Pintu Harmonik
.52	Pintu Biasa
.53	Pintu Sorok (Sorong)
.54	Jendela Kayu
.55	Jendela Sorok (Sorong)
.56	Jendela Vertikal
650	TATA KOTA
651	Daerah Perdagangan/Pelabuhan
.1	Daerah Pusat Pebelanjaan
.2	Daerah Perkotaan
652	Daerah Pemerintahan
653	Daerah Perumahan (Site dan Service)
.1	Kepadatan Rendah (Low Density)
.2	Kepadatan Tinggi (High Density)
654	Daerah Industri
.1	Industri Berat
.2	Industri Ringan
.3	Industri Rumah (Home Industry)
655	Daerah Rekreasi
.1	Taman Kota (PublicGarden)
.2	Sport and Playing Fields
.3	Open Space
656	Transportasi
.1	Jaringan Jalan
.11	Penerangan Jalan
.2	Jaringan Kereta Api
.3	Jaringan Sungai
657	Assaineering
.1	Saluran Pengumpulan
.2	Saluran Pengolahan
.21	Bangunan
.211	Bangunan Penyaring
.212	Bangunan Penghancur Kotoran/sampah
.213	Bangunan Pengendapan
.214	Bangunan Pengereng Lumpur
.22	Unit Desinfektan
.23	Unit Pemompaan
658	Kesehatan Lingkungan
.1	Persampahan
.11	Bangunan Pengumpul
.12	Bangunan Pemusnahan]
.2	Pengotoran Udara
.3	Pengotoran Air
.31	Air Buangan Industri/Limbah
.4	Kegaduhan
.5	Kebersihan Kota
659	-

660	TATA LINGKUNGAN
.1	Lingkungan Hidup
.2	Kebersihan Lingkungan
.3	Pencemaran
.31	Pencemaran Air
.32	Pencemaran Udara
.33	Pencemaran Limbah B3
661	Daerah Hutan
662	Daerah Pertanian/perkebunan
663	Daerah Pemukiman
664	Pusat Pertumbuhan
665	Transportasi
.1	Jaringan Jalan
.2	Jaringan Kereta Api
.3	Jaringan Sungai
666	-
667	-
668	-
669	-
670	KETENAGAAN
671	Listrik
.1	Kelistrikan
.11	Kelistrikan PLN
.12	Kelistrikan Non PLN
.2	Pembangkit Tenaga Listrik
.21	PLTA - Pembangkit Listrik Tenaga Air
.22	PLTD - Pembangkit Listrik Tenaga Diesel
.23	PLTG - Pembangkit Listrik Tenaga Gas
.24	PLTM - Pembangkit Listrik Tenaga Matahari
.25	PLTN - Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir
.26	PLTPB - Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi
.27	PLTU - Pembangkit Listrik Tenaga Uap
.28	Pembangkit Listrik Tenaga Lainnya
.3	Transmisi Tenaga Listrik
.31	Gardu Induk/Gardu Penghubung/Gardu Trafo
.32	Saluran Udara Tegangan Tinggi
.33	Kabel Bawah Tanah
.34	Kabel Bawah Laut/Air
.4	Distribusi Tenaga Listrik
.41	Gardu Distribusi
.42	Tegangan Rendah
.43	Tegangan Menengah
.44	Tegangan Tinggi
.45	Jaringan Bawah Tanah
.5	Penguasaan Listrik
.51	Sambungan Listrik
.52	Penjualan Tenaga Listrik
.53	Tarif Listrik
.54	Instalatur Listrik
672	Tenaga Air
673	Tenaga Minyak
674	Tenaga Gas
675	Tenaga Matahari
676	Tenaga Nuklir
677	Tenaga Panas Bumi
678	Tenaga Uap

679	Tenaga Lainnya
680	PERALATAN
681	Peralatan Berat
682	Peralatan Ringan
683	-
684	-
685	-
686	-
687	-
688	-
689	-
690	AIR MINUM
691	Intake
	.1 Broncaptering
	.2 Sumur
	.21 Sumur Pompa
	.22 Sumur Artesis
	.3 Bendungan
	.4 Saringan (Screen)
	.5 Pintu Air
	.6 Saluran Pembawa
	.7 Alat Ukur
	.8 Perpompaan
692	Tranmisi Air Beku
	.1 Perpipaan
	.2 Katup Udara (Air Relief)
	.3 Katup Penguras (Blow Off)
	.4 Bak Pelepas Tekanan
	.5 Jembatan Pipa
	.6 Syphon
693	Instalasi Pengelolaan
	.1 Bangunan Ukur
	.2 Bangunan Areasi
	.3 Bangunan Pengendapan
	.4 Bangunan Penyuluh Bahan Kimia
	.5 Bangunan Pengaduk
	.6 Bangunan Saringan
	.7 Perpompaan
	.8 Cear Hell
694	Distribusi
	.1 Reservoir Menara Bawah Tanah
	.11 Menara
	.12 Reservoir Di Bawah Tanah
	.2 Perpipaan
	.3 Perpompaan
	.4 Jembatan Pipa
	.5 Syphon
	.6 Hydran
	.61 Hydran Umum
	.62 Hydran Kebakaran
	.7 Katup
	.71 Katup Udara (Air Relief)
	.72 Katup Pelepas (Blow Off)
	.8 Bak Pelepas Tekanan (Pressure Reducing Valve)
695	Perusahaan Daerah Air Minum

696 -
697 -
698 -
699 -

700
PENGAWASAN

700 PENGAWASAN
701 Bidang Urusan Dalam
702 Bidang Peralatan
703 Bidang Kekayaan Daerah
704 Bidang Perpustakaan/Dokumentasi/Kearsipan/Sandi
705 Bidang Perencanaan
706 Bidang Organisasi/ketatalaksanaan
707 Bidang penelitian
708 Bidang konferensi
709 Bidang perjalanan dinas
710 BIDANG PEMERINTAHAN
711 Bidang Pemerintahan Pusat
712 Bidang Pemerintahan Provinsi
713 Bidang Pemerintahan Kabupaten/Kota
714 Bidang Pemerintahan Desa
715 Bidang MPR/DPR
716 Bidang DPR Provinsi
717 Bidang DPR Kabupaten/Kota
718 Bidang Hukum
719 Bidang Hubungan Luar Negeri
720 BIDANG POLITIK
721 Bidang Kepartaian
722 Bidang Organisasi Kemasyarakatan
723 Bidang Organisasi Profesi Dan Fungsional
724 Bidang Organisasi Pemuda
725 Bidang Organisasi Buruh, Tani Dan Nelayan
726 Bidang Organisasi Wanita
727 Bidang Pemilihan Umum
728 -
729 -
730 BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN
731 Bidang Pertahanan
732 Bidang Kemiliteran
733 Bidang Perlindungan Masyarakat
734 Bidang Keamanan
735 Bidang Kejahatan
736 Bidang Bencana
737 Bidang Kecelakaan
738 -
739 -
740 BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT
741 Bidang Pembangunan Desa
742 Bidang Pendidikan
743 Bidang Kebudayaan
744 Bidang Kesehatan
745 Bidang Agama
746 Bidang Sosial

747	Bidang Kependudukan
748	Bidang Media Massa
749	-
750	BIDANG PEREKONOMIAN
751	Bidang Perdagangan
752	Bidang Pertanian
753	Bidang Perindustrian
754	Bidang Pertambangan/Kesamudraan
755	Bidang Perhubungan
756	Bidang Tenaga Kerja
757	Bidang Permodalan
758	Bidang Perbankan/Moneter
759	Bidang Agraria
760	BIDANG PEKERJAAN UMUM
761	Bidang Pengairan
762	Bidang Jalan
763	Bidang Jembatan
764	Bidang Bangunan
765	Bidang Tata Kota
766	Bidang Lingkungan
767	Bidang Ketenagaan
768	Bidang Peralatan
769	Bidang Air Minum
770	-
771	-
772	-
773	-
774	-
775	-
776	-
777	-
778	-
779	-
780	BIDANG KEPEGAWAIAN
781	Bidang Pengadaan Pegawai
782	Bidang Mutasi Pegawai
783	Bidang Kedudukan Pegawai
784	Bidang Kesejahteraan Pegawai
785	Bidang Cuti
786	Bidang Penilaian
787	Bidang Tata Usaha Kepegawaian
788	Bidang Pemberhentian Pegawai
789	Bidang Pendidikan Pegawai
790	BIDANG KEUANGAN
791	Bidang Anggaran
792	Bidang Otorisasi
793	Bidang Vertifikasi
794	Bidang Pembukuan
795	Bidang Perbendaharaan
796	Bidang Pembina Kebendaharaan
797	Bidang Pendapatan
798	-
799	Bidang Bendaharaan

800
KEPEGAWAIAN

- 800 KEPEGAWAIAN
Klasifikasi Disini : Kebijakanasanaan Pegawai
 - .1 Perencanaan
 - .2 Penelitian
 - .043 Pengaduan
 - .05 Tim
 - .07 Statistik
 - .08 Peraturan Perundang-Undangan
- 801 -
- 802 -
- 803 -
- 804 -
- 805 -
- 806 -
- 807 -
- 808 -
- 809 -
- 810 PENGADAAN
Meliputi : Lamaran, Pengujian Kesehatan, Dan Pengangkatan Calon Pegawai
- 811 Lamaran
 - .1 Testing
 - .2 Screening
 - .3 Panggilan
- 812 Pengujian Kesehatan
- 813 Pengangkatan Calon Pegawai
 - .1 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan I
 - .2 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II
 - .3 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III
 - .4 Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV
 - .5 Pengangkatan Calon Guru Inpres/Guru Bantu
- 814 Pengangkatan Lepas
 - .1 Pengangkatan Tenaga Bulanan/Tenaga Kontrak
 - .2 Pengangkatan Tenaga Harian
 - .3 Pengangkatan Tenaga Pensiunan
- 815 -
- 816 -
- 817 -
- 818 -
- 819 -
- 820 MUTASI
Meliputi : Pengangkatan, kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, pemindahan, pelimpahan, datasering, tugas belajar, wajib militer, dsb
- 821 Pengangkatan
 - .1 Pengangkat menjadi Pegawai tetap
 - .11 Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Golongan I
 - .12 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan II
 - .13 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan III
 - .14 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Golongan IV
 - .15 Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil Yang Cuti Di Luar Tanggungan Negara
 - Pengangkatan dalam jabatan, pembebasan dari jabatan,

.2	Berita Acara Serah Terima Jabatan
.21	Sekjen/Dirjen/Irjen/Kabag
	Kepala Biro/Direktur/Inspektur/Kepala
.22	Pusat/Sekretaris/Kepala Dinas/Asisten Sekwilda Kepala
	Bagian/Kepala Sub Direktorat/Kepala
.23	Bidang/Inspektur Pembantu Kepala Sub Bagian Kepala
	Seksi/Kepala
.24	Bidang/Pemeriksa
.25	Residen/Pembantu Gubernur
.26	Wedana/Pembantu Bupati
.27	Camat
.28	Lurah Administratif (Lurah Desa)
.29	Jabatan Lainnya
822	Kenaikan Gaji Berkala
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan IV
823	Kenaikan Pangkat/Pengangkatan
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan IV
824	Pemindahan/Pelimpahan/Perbantuan
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan IV
.5	Lolos Butuh
825	Datasering dan Penempatan Kembali
826	Penunjukan Tugas Belajar
.1	Dalam Negeri
.2	Luar Negeri
.3	Tunjangan Belajar
.4	Penempatan Kembali
827	Wajib Belajar
828	Mutasi Pegawai Instansi Lain
829	-
830	KEDUDUKAN
	Meliputi : Perhitungan Masa Kerja, Penyesuaian Pangkat/Gaji,
	Penghargaan Ijazah dan Jenjang Pangkat
831	Perhitungan Masa Kerja
832	Penyesuaian Pangkat/Gaji
.1	Pegawai Golongan I
.2	Pegawai Golongan II
.3	Pegawai Golongan III
.4	Pegawai Golongan IV
833	Penghargaan Ijazah/Penyesuaian
834	Jenjang Pangkat/Eselonering
835	-
836	-
837	-
838	-
839	-

840	KESEJAHTERAAN PEGAWAI
.1	Meliputi : Tunjangan, Dana, Perawatan Kesehatan, Koperasi, Distribusi, Perumahan/Tanah, Bantuan Sosial, Rekreasi dan Dispenasasi
841	Tunjangan
.1	Jabatan
.2	Kehormatan
.3	Kematian/Uang Duka
.4	Tunjangan Hari Raya
.5	Perjalanan Dinas Tetap/Cuti/Pindah
.6	Keluarga
.7	Sandang, Pangan, Papan (Bapetarum)
842	Dana
.1	Taspen
.2	Kesehatan
.3	Asuransi
843	Perawatan Kesehatan
.1	Poliklinik
.2	Perawatan Dokter
.3	Obat-Obatan
.4	Keluarga Berencana
844	Koperasi/Distribusi
.1	Distribusi Pangan
.2	Distribusi Sandang
.3	Distribusi Papan
845	Perumahan/Tanah
.1	Perumahan Pegawai
.2	Tanah Kapling
.3	Losmen/Hotel
846	Bantuan Sosial
.1	Bantuan Kebakaran
.2	Bantuan Kebutuhan
847	-
848	-
849	-
850	CUTI Meliputi Cuti Tahunan, Cuti Besar, Cuti Sakit, Cuti Hamil, Cuti Naik Haji, Cuti Diluar Tanggungan Negara Dan Cuti Alasan Lain
851	Cuti Tahunan
852	Cuti Besar
853	Cuti Sakit
854	Cuti Hamil
855	Cuti Naik Haji/Umroh
856	Cuti Diluar Tanggungan Negara
857	Cuti Alasan Lain/Alasan Penting
858	-
859	-
860	PENILAIAN
	Meliputi : Penghargaan, Hukuman, Konduite, Ujian Dinas, Penilaian Kekayaan Pribadi dan Rehabilitasi
861	Penghargaan
.1	Bintang/Satyalencana
.2	Kenaikan Pangkat Anumerta
.3	Kenaikan Gaji Istimewa

- .4 Hadiah Berupa Uang
- .5 Pegawai Teladan
- 862 Hukuman
 - .1 Teguran Peringatan
 - .2 Penundaan Kenaikan Gaji
 - .3 Penurunan Pangkat
 - .4 Pemindahan
- Catatan : Pemberhentian Untuk Sementara Waktu dan Pemberitahuan Tidak Dengan Hormat Lihat 887 dan 888
- 863 Konduite, DP3, Disiplin Pegawai
- 864 Ujian Dinas
 - .1 Tingkat I
 - .2 Tingkat II
 - .3 Tingkat III
- 865 Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri
Meliputi : petunjuk pelaksanaan hidup sederhana, penilaian kekayaan pribadi (LP2P)
- 866 Rehabilitasi/Pengaktifan Kembali
- 867 -
- 868 -
- 869 -
- 870 TATA USAHA KEPEGAWAIAN
Meliputi : Formasi, Bezetting, Registrasi, Daftar, Riwayat, Hak Penggajian, Sumpah/Janji dan Korps Pegawai
- 871 Formasi
- 872 Bezetting
- 873 Registrasi
 - .1 NIP
 - .2 KARPEG
 - .3 Legitimasi/Tanda Pengenal
 - .4 Daftar Keluarga, Perkawinan, Perceraian, Karis, Karsu
- 874 Daftar Riwayat Hidup / Pekerjaan/
 - .1 Tanggal Lahir
 - .2 Penggantian Nama
 - .3 Izin Keptartaian/Organisasi
- 875 Kewenangan Mutasi Pegawai
 - .1 Pelimpahan Wewenang
 - .2 Specimen Tanda Tangan
- 876 Penggajian
 - .1 SKPP
- 877 Sumpah/Janji
- 878 Korps Pegawai
- 879 -
- 880 PEMBERHENTIAN
Meliputi Atas Pemberhentian, Permintaan Sendiri, Dengan Hak Pensiun, Karena Meninggal Dunia, Alasan Lain, Dengan Diberi Uang Pesangon, Uang Tunggu Untuk Sementara Waktu Dan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat
- 881 Permintaan Sendiri
- 882 Dengan Hak Pensiun
 - .1 Golongan 1
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai golongan I
 - .2 Golongan 2
Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan II

- .3 Golongan 3
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III
- .4 Golongan 4
 - Pemberhentian dengan hak pensiun pegawai negeri golongan III
 - .5 Pensiun Janda/Duda
 - .6 Pensiun Yatim Piatu
 - .7 Uang Muka Pensiun
 - .8 Pensiun Dini
- 883 Karena Meninggal
 - .1 Karena meninggal dalam tugas
- 884 Alasan Lain
- 885 Uang Pesangon
- 886 Uang Tunggu
- 887 Untuk sementara waktu
- 888 Tidak dengan hormat
- 998 -
- 890 PENDIDIKAN PEGAWAI
 - Meliputi : Perencanaan, Pendidikan Reguler, Pendidikan Non Reguler, Pendidikan Ke Luar Negeri, Metode, Tenaga Pengajar, Administrasi Pendidikan, Fasilitas Sarana Pendidikan
- 891 Perencanaan
 - .1 Program
 - .2 Kurikulum dan Silabi
 - .3 Proposal (TOR)
- 892 Pendidikan _Eguler/Kader
 - .1 IPDN/STPDN
 - .2 Kursus-Kursus Reguler
- 893 Pendidikan Dan Pelatihan/Non Reguler
 - .1 LEMHANAS
 - Pendidikan Dan Pelatihan Struktural, SPATI, SPAMEN
 - .2 SPAMA , ADUMLA, ADUM
 - .3 Kursus-Kursus/Penataran
 - .4 Diklat teknik, Fungsional Dan Manajemen Pemerintahan
 - .5 Diklat Lainnya
- 894 Pendidikan Luar Negeri
 - .1 Berkesinambungan/Berkala/Bergelar
 - .2 Non Gelar/Diploma
- 895 Metode
 - .1 Kuliah
 - .2 Ceramah, Simposium
 - .3 Diskusi, Raker, Seminar, Lokakarya, Orientasi
 - .4 Studi Lapangan, KKN, Widyawisata
 - .5 Tanya Jawab/Sylabi/Modul/Kursil
 - .7 Penugasan
 - .8 Gladi
- 896 Tenaga Pengajar/Widyaiswara/Narasumber
 - .1 Moderator
- 897 Administrasi Pendidikan
 - .1 Tahun Pelajaran
 - .2 Persyaratan, meliputi Pendaftaran, Testing, Ujian
 - .3 STTP
 - .4 Penilaian Angka Kredit
 - .5 Laporan Pendidikan Dan Pelatihan
- 898 Fasilitas Belajar
 - .1 Tunjangan Belajar
 - .2 Asrama

.3	Uang Makan
.4	Uang Transport
.5	Uang Buku
.6	Uang Ujian
.7	Uang Semester/Uang Kuliah
.8	Uang Saku
899	Sarana
.1	Bantuan Sarana Belajar
.2	Bantuan Alat-Alat Tulis
.3	Bantuan Sarana Belajar Lainnya

900 KEUANGAN

900	KEUANGAN
901	Nota Keuangan
902	APBN
903	APBD
904	APBN-P
905	Dana Alokasi Umum
906	Dana Alokasi Khusus
907	Dekonsentrasi (Perlimpahan Dana Dari Pusat Ke Daerah)
908	-
909	-
910	ANGGARAN
911	Rutin / BTL
912	Pembangunan / BL
913	Anggaran Belanja Tambahan
914	Daftar Isian Kegiatan (DIK)
.1	Daftar Usulan Kegiatan (DUK)
915	Daftar Isian Proyek (DIP) / DPA
.1	Daftar Usulan Proyek (DUP) / RKA
.2	Daftar Isian Pengguna Anggaran (DIPA)
916	Revisi Anggaran
917	-
918	-
919	-
920	OTORISASI/SKO
921	Rutin / BTL
922	Pembangunan / BL
923	SIAP
924	Ralat SKO
925	-
926	-
927	-
928	-
929	-
930	VERIFIKASI
931	SPM Rutin (Daftar P8)
932	SPM Pembangunan (Daftar P8)
933	Penerimaan (Daftar P6.P7)
934	SPJ Rutin / BTL
935	SPJ Pembangunan / BL
936	Nota Pemeriksaan

937	SP Pemindahan Pembukuan
938	-
939	-
940	PEMBUKUAN
941	Penyusunan Perhitungan Anggaran
942	Permintaan Data Anggaran Laporan Fisik Pembangunan
943	Laporan Fisik Pembangunan
944	-
945	-
946	-
947	-
948	-
949	-
950	PERBENDAHARAAN
951	Tuntutan Ganti Rugi (ICW Pasal 74)
952	Tuntutan Bendaharawan
953	Penghapusan kekayaan Negara
954	Pengangkatan/Penggantian Pemimpin Proyek Dan Pengangkatan/Pemberhentian Bendaharawan
955	Specimen Tanda Tangan
956	Surat Tagih Piutang, Ikhtisar Bulanan
957	-
958	-
959	-
960	PEMBINAAN KEBENDAHARAAN
961	Pemeriksaan Kas dan Hasil Pemeriksaan Kas
962	Pemeriksaan Administrasi Bendaharawan
963	Laporan Keuangan Bendaharawan
964	-
965	-
966	-
967	-
968	-
969	-
970	PENDAPATAN
971	Perimbangan Keuangan
972	Subsidi
973	Pajak, Ipeda, IHH, IHPH
974	Retribusi
975	Bea
976	Cukai
977	Pungutan/PNBP
978	Bantuan Presiden, Menteri Dan Bantuan Lainnya
979	Pendapatan lainnya
.1	Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan
.11	Pelepasan Hak Atas Tanah
.12	Penjualan Rumah Jabatan, Rumah Dinas
.13	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua
.14	Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat
.15	Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris
.16	Penjualan Drum Bekas
.17	Penjualan Hasil Penebangan Pohon
.2	Penerimaan Jasa Giro
.21	Jasa Giro Kas Daerah
.22	Jasa Giro Pemegang Kas
.23	Jasa Giro Khusus

.3	Penerimaan Bunga Bank
.31	Bunga Deposito
.32	Bunga Tabungan
.4	Penerimaan Ganti Rugi Atas Kerugian/Kehilangan Kekayaan Daerah (TPTGR)
.41	Sumbangan Pihak Ke Tiga
.42	Sumbangan Pihak Ketiga Kendaraan (Dealer)
.43	Sumbangan Pihak Ketiga Kayu
.5	Penerimaan Lain-lain
.51	Penerimaan Kembali Kredit BKK
.52	Ternak Tidak Layak Bibit
.53	Sewa Internet
.54	Penerimaan dan Dana Bergulir
.55	Kerjasama Dengan Bumida
.56	Penerimaan DUKS
.57	Tempat Rekreasi Nusakambangan
.58	Setoran TP/TGR
.59	Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas
980	
981	
982	
983	
984	
985	
986	
987	
988	
989	
990	BENDAHARAWAN
991	SKPP/SPP
992	Teguran SPJ
993	-
994	-
995	-

BUPATI PANGANDARAN,

Ttd/Cap

H. JEJE WIRADINATA

Diundangkan di Parigi
pada tanggal 28 Maret 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN,

Ttd/Cap

M A H M U D
BERITA DAERAH KABUPATEN PANGANDARAN
TAHUN 2016 NOMOR 14